

MATERI UJI KOMPETENSI TEORI

JABATAN KERJA : Ahli Peraturan Zonasi

UNIT KOMPETENSI : Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)

KODE UNIT KOMPETENSI : F45.PZ01.001.01

Elemen Kompetensi: 1. Mengidentifikasi ketentuan SMK3L							
No.	Kriteria Unjuk Kerja (KUK)	Indikator Unjuk Kerja (IUK)	Aspek Kompetensi			Daftar Pertanyaan	Kunci Jawaban
			K	S	A		
1.1	Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan SMK3L dikompilasi dengan lengkap	1.1.1 Dapat menjelaskan keterkaitan antara peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) dengan ahli penyusunan peraturan zonasi				Jelaskan secara singkat keterkaitan antar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) dengan ahli penyusunan peraturan zonasi	Menjelaskan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Kewajiban ahli penyusunan peraturan zonasi untuk menerapkan SMK3L sebagai amanat Undang-Undang - Referensi ahli peraturan zonasi dalam menyusun SMK3L
		1.1.2 Mampu mengumpulkan referensi SMK3L untuk di kompilasi				Sebutkan beberapa referensi SMK3L yang perlu dikumpulkan	Beberapa referensi SMK3L: <ul style="list-style-type: none"> - UU No. 1/1970 tentang Keselamatan Kerja - UU No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi - UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan - PP No. 102/2000 tentang Standardisasi Nasional - Permennaker No. PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja
1.2	Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan SMK3L diuraikan	1.2.1 Dapat menjelaskan jenis dan manfaat peraturan-perundang-undangan yang berkaitan dengan				Jelaskan secara singkat jenis dan manfaat peraturan-perundang-undangan yang berkaitan dengan	Menjelaskan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang yang mengatur tentang

	dengan cermat	SMK3L, terhadap proses penyusunan peraturan zonasi			SMK3L, terhadap proses penyusunan peraturan zonasi	<p>standardisasi proses bekerja profesi-profesi yang diaturnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang yang mengatur tentang proses bekerja di dunia jasa konstruksi - Undang-Undang yang mengatur tentang hak dan keselamatan tenaga kerja - Peraturan Menteri yang memberi petunjuk pembuatan SMK3L
		1.2.2 Mampu mengumpulkan undang-undang yang berkaitan dengan SMK3L dan diperlukan untuk penyusunan peraturan zonasi			Sebutkan beberapa undang-undang yang berkaitan dengan SMK3L dan diperlukan untuk penyusunan peraturan zonasi	<p>Beberapa UU yang berkaitan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UU No. 1/1970 tentang Keselamatan Kerja - UU No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi - UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan
1.3	Hasil uraian peraturan SMK3L yang berhubungan dengan penyusunan peraturan zonasi dirumuskan dengan tepat	1.3.1 Dapat menjelaskan arti pentingnya pemahaman yang relevan dari keselamatan dan kesehatan kerja penyusunan peraturan zonasi			Jelaskan secara singkat pentingnya pemahaman yang relevan dari keselamatan dan kesehatan kerja penyusunan peraturan zonasi	<p>Menjelaskan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hak-hak tenaga kerja untuk memiliki lingkungan kerja yang aman dan sehat - Tingkat efektivitas dan efisiensi yang dimiliki oleh lingkungan kerja yang aman dan sehat - Daya saing tenaga dan lingkungan kerja yang meningkat dengan diterapkannya SMK3L
		1.3.2 Mampu menggunakan panduan kerja yang relevan dari SMK3L			Sebutkan beberapa panduan kerja yang relevan dari SMK3L	<p>Beberapa panduan kerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permennaker No. PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Tingkat - Permennaker No.

											<p>PER.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban, dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permen PU No. 09/PER/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Elemen Kompetensi: 2. Melakukan antisipasi terhadap potensi kecelakaan kerja							
No.	Kriteria Unjuk Kerja (KUK)	Indikator Unjuk Kerja (IUK)	Aspek Kompetensi			Daftar Pertanyaan	Kunci Jawaban
			K	S	A		
2.1	Potensi kecelakaan kerja yang mungkin terjadi terkait kegiatan survei lapangan diidentifikasi	2.1.1 Mampu membuat daftar bagian dari kegiatan survei yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja				Sebutkan beberapa bagian dari kegiatan survei yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja	Menjelaskan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Survei di bentukan air - Survei di daerah rawan longsor - Survei di daerah utilitas infrastruktur (listrik, gas, dll)
		2.1.2 Dapat menganalisis tingkat potensi kecelakaan kerja dalam kegiatan survei				Berikan analisis tingkat potensi kecelakaan kerja dalam kegiatan survei	Analisis diberikan dengan penjelasan logis yang runut.
2.2	Tindakan pencegahan terhadap potensi kecelakaan kerja dirumuskan	2.2.1 Dapat menganalisis bentuk kecelakaan kerja yang dapat terjadi pada saat kegiatan survei				Sebutkan beberapa bentuk kecelakaan kerja yang dapat terjadi pada saat kegiatan survei	Menjelaskan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Kecelakaan di bentukan air (hanyut, tenggelam, dll) - Tertimpa tanah longsor - Kecelakaan di daerah utilitas infrastruktur (tersengat listrik, kebakaran, merusak utilitas, dll)
		2.2.2 Dapat menganalisis kondisi yang menyebabkan kecelakaan kerja terjadi				Berikan analisis kondisi yang menyebabkan kecelakaan kerja terjadi	Analisis kondisi diberikan dengan penjelasan yang logis dan runut mulai dari bentuk survei yang sedang dilakukan hingga kecelakaan yang terjadi.
		2.2.3 Mampu menyusun standar rangkaian tindakan yang tepat agar kecelakaan				Sebutkan beberapa rangkaian tindakan yang tepat agar kecelakaan kerja	Tindakan yang diberikan disertai dengan penjelasan yang logis dengan mempertimbangkan tujuan survey yang ingin dicapai serta kondisi yang

		kerja tidak terjadi				tidak terjadi	menyebabkan kecelakaan kerja terjadi.
2.3	Daftar simak potensi kecelakaan kerja dan tindakan pencegahan disusun	2.3.1 Dapat menjelaskan fungsi daftar simak dan pengendalian kecelakaan				Sebutkan fungsi daftar simak dan pengendalian kecelakaan	Beberapa fungsi daftar simak: - Referensi lengkap kemungkinan kecelakaan yang dapat terjadi beserta tindakan pencegahannya - Bahan evaluasi tingkat resiko metode survei lapangan tertentu
		2.3.2 Mampu menyusun daftar simak potensi kecelakaan kerja dan tindak pencegahan berdasarkan tingkatannya dalam kegiatan survei				Berikan contoh daftar simak potensi kecelakaan kerja dan tindak pencegahan berdasarkan tingkatannya dalam kegiatan survei	Contoh sederhana daftar simak potensi kecelakaan kerja dan tindak pencegahannya: 1. Tenggelam/hanyut di bentukan air, pencegahan: tidak memasuki bentukan air kecuali dengan mengenakan APD tertentu 2. Tertimpa tanah longsor, pencegahan: berjalan min. 5 meter dari titik lokasi tanah longsor 3. Menyebabkan korsleting/kebakaran di instalasi listrik, pencegahan: tidak membawa bahan mudah terbakar di dekat instalasi listrik

Elemen Kompetensi: 3 Melaksanakan SMK3L

No.	Kriteria Unjuk Kerja (KUK)	Indikator Unjuk Kerja (IUK)	Aspek Kompetensi			Daftar Pertanyaan	Kunci Jawaban
			K	S	A		
3.1	Kondisi kerja yang baik dan minim potensi kecelakaan kerja dirumuskan	3.1.1 Dapat menyusun kriteria lingkungan kerja yang baik dan minim potensi kecelakaan kerja				Berikan contoh kriteria lingkungan kerja yang baik dan minim potensi kecelakaan kerja	Kriteria lingkungan kerja yang diberikan harus mempertimbangkan kegiatan yang dilakukan dan merujuk pada rujukan yang tepat.
		3.1.2 Mampu menyusun standar prosedur bekerja yang baik dan minim potensi kecelakaan kerja				Berikan contoh prosedur bekerja yang baik dan minim potensi kecelakaan kerja	Prosedur bekerja yang diberikan harus mempertimbangkan kegiatan yang dilakukan dan merujuk pada rujukan yang tepat.
3.2	Kondisi kerja dikontrol dan dievaluasi secara berkala	3.2.1 Dapat menyusun prosedur evaluasi kondisi kerja				Berikan contoh prosedur evaluasi kondisi kerja	Prosedur evaluasi kondisi kerja yang diberikan harus merujuk pada lingkungan kerja yang baik yang telah dijelaskan sebelumnya.
3.3	Alat Pelindung Diri (APD) dipersiapkan	3.3.1 Dapat mengidentifikasi bagian dari kegiatan survei yang membutuhkan Alat				Sebutkan beberapa bagian dari kegiatan survei yang	Bagian dari survey yang disebutkan harus merujuk pada bagian kegiatan survey yang memiliki potensi kecelakaan kerja yang telah disebutkan

		Pelindung Diri			membutuhkan Alat Pelindung Diri	sebelumnya. Misal: sruvei di bentukan air, surveyy di instalasi listrik, dll.
		3.3.2 Dapat mengidentifikasi APD yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku			Sebutkan APD yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	APD yang disebutkan harus merujuk pada rujukan yang tepat.
3.4	Prosedur dan perlengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dipersiapkan	3.4.2 Dapat menyusun prosedur P3K pada setiap kecelakaan kerja			Berikan contoh prosedur P3K pada setiap kecelakaan kerja	Misal: <ul style="list-style-type: none"> - Tenggelam: menarik ke darat, memberi pernafasan buatan, mengeluarkan air dari paru-paru, memanggil ambulans Hanyut: menggunakan tali untuk menarik ke darat
		3.4.3 Dapat mengidentifikasi perlengkapan P3K yang dibutuhkan pada setiap kecelakaan kerja			Sebutkan perlengkapan P3K yang dibutuhkan pada setiap kecelakaan kerja	Misal: <ul style="list-style-type: none"> - Tenggelam: tabung oksigen - Hanyut: tali tambang

MATERI UJI KOMPETENSI TEORI

JABATAN KERJA : Ahli Peraturan Zonasi

UNIT KOMPETENSI : Mempersiapkan Referensi yang Relevan dengan Kegiatan Penyusunan Peraturan Zonasi

KODE UNIT KOMPETENSI : F45.PZ01.002.01

Elemen Kompetensi: 1 Mempersiapkan dokumen rujukan pada tingkat kabupaten/kota							
No.	Kriteria Unjuk Kerja (KUK)	Indikator Unjuk Kerja (IUK)	Aspek Kompetensi			Daftar Pertanyaan	Kunci Jawaban
			K	S	A		
1.1	Peraturan perundang-undangan tata ruang dan peraturan-peraturan sektoral serta produk perencanaan yang ditetapkan diidentifikasi dengan tepat	1.1.1 Dapat menjelaskan fungsi, kedudukan, pengertian, dan lingkup peraturan zonasi				Jelaskan secara singkat fungsi, kedudukan, pengertian, dan lingkup peraturan zonasi	Fungsi, kedudukan, pengertian, dan lingkup peraturan zonasi: <ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan lebih lanjut untuk pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam pola pemanfaatan ruang suatu wilayah - Perangkat pengendalian pemanfaatan ruang - Penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota - Rujukan untuk menyusun Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) - Rujukan perizinan, pengawasan dan penertiban dalam pengendalian pemanfaatan ruang
		1.1.2 Mampu mengumpulkan beberapa peraturan perundang-				Sebutkan dan jelaskan secara singkat beberapa peraturan	Menjelaskan tentang: <ul style="list-style-type: none"> - UU No. 26 Tahun 2007

		undangan yang terkait dengan peraturan zonasi				perundang-undangan yang terkait dengan peraturan zonasi	<ul style="list-style-type: none"> - tentang Penataan Ruang UU No. 24 Tahun 1992 - tentang Penataan Ruang PP No. 26 Tahun 2008 - tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Nasional - PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
		1.1.3 Mampu mengumpulkan beberapa peraturan sektoral serta produk perencanaan yang terkait dengan peraturan zonasi				Sebutkan dan jelaskan secara singkat beberapa peraturan sektoral serta produk perencanaan yang terkait dengan peraturan zonasi	Menjelaskan tentang: <ul style="list-style-type: none"> - RTRW Provinsi - RTRW Kabupaten/Kota - Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota - Rencana Tata Ruang Kota (RTRK) - Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), dll
1.2	Data rujukan dirangkum dengan baik	1.2.1 Dapat mengumpulkan peraturan perundang-undangan terkait peraturan zonasi				Buatlah rangkuman peraturan perundang-undangan terkait peraturan zonasi di DKI Jakarta	Merangkum isi dari: <ul style="list-style-type: none"> - UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang - UU No. 24/1992 tentang Penataan Ruang - PP No. 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang - Perpres No. 54/2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur
		1.2.2 Dapat mengumpulkan peraturan sektoral terkait peraturan zonasi				Buatlah rangkuman peraturan sektoral terkait peraturan zonasi di DKI Jakarta	Merangkum isi dari: <ul style="list-style-type: none"> - Perda DKI Jakarta No. /2011 tentang RTRW DKI Jakarta 2030
		1.2.3 Dapat menentukan hirarki peraturan-peraturan terkait peraturan zonasi				Susunlah hirarki peraturan-peraturan tersebut	Hirarki perundang-undangan di Indonesia: <ol style="list-style-type: none"> 1. UUD 1945

							2. TAP MPR 3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 4. Peraturan Pemerintah 5. Peraturan Presiden 6. Peraturan Daerah Contoh hirarki peraturan terkait peraturan zonasi: 1. UU No. 26/2007 2. PP No. 15/2010 3. Perpres No. 54/2008 4. Perda DKI Jakarta No. /2011
1.3	Dokumen kertas kerja (<i>working paper</i>) tentang data rujukan disusun dengan teliti	1.3.1 Dapat menguraikan substansi yang relevan dengan kertas kerja (<i>working paper</i>)				Sebutkan dan uraikan substansi-substansi yang relevan dengan kertas kerja (<i>working paper</i>)	Beberapa substansi dokumen kertas kerja: - Peraturan perundang-undangan - Peraturan sektoral - Produk perencanaan lain - Referensi peraturan zonasi
		1.3.2 Mampu menyusun sistematika dokumen kertas kerja				Uraikan sistematika dokumen kertas kerja	Contoh sistematika dokumen kertas kerja: - Latar belakang peraturan zonasi - Tujuan yang ingin dicapai dari peraturan zonasi - Peraturan pada berbagai tingkat, disusun sesuai hirarkinya - Referensi peraturan zonasi

Elemen Kompetensi: 2 Mempersiapkan peta kerja untuk kabupaten/kota

No.	Kriteria Unjuk Kerja (KUK)	Indikator Unjuk Kerja (IUK)	Aspek Kompetensi			Daftar Pertanyaan	Kunci Jawaban	T	P
			K	S	A				
2.1	Peta eksisting yang relevan dikumpulkan	2.1.1 Dapat menjelaskan jenis peta yang diperlukan				Sebutkan jenis-jenis peta yang diperlukan dalam penyusunan peraturan zonasi	Menyebutkan setidaknya: - Peta produk perencanaan		

	dengan cermat	dalam penyusunan peraturan zonasi				(RTRWN, RTRWP, RTRWK/Kab, RDTRK) - Peta geografis		
		2.1.2 Dapat menentukan kebutuhan substansi minimum dari peta-peta yang telah dikompilasi			Jelaskan kebutuhan substansi minimum dari peta-peta tersebut	Peta produk perencanaan: fungsi lahan, intensitas bangunan, tata massa bangunan, infrastruktur, jaringan transportasi Peta geografis: kontur, sifat tanah, bentukan air		
2.2	Kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh peta eksisting diidentifikasi dengan tepat	2.2.1 Dapat menginventarisasi kebutuhan-kebutuhan yang terpenuhi oleh peta eksisting			Sebutkan kebutuhan-kebutuhan data yang telah dipenuhi oleh peta geografis, RTRW, dan RTDRK diatas	<i>Peta-peta tersebut memiliki substansi minimum yang ditetapkan dan memiliki informasi yang tidak bertentangan serta saling melengkapi</i>		
		2.2.2 Mampu melaksanakan kegiatan survei lapangan untuk melengkapi peta eksisting			Jelaskan survei lapangan yang perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi	<i>Survei yang perlu dilakukan harus dapat menghasilkan data-data yang belum dimiliki</i>		
		2.2.3 Dapat mengaitkan hasil survei lapangan dengan peta eksisting			(Diberikan data hasil survey kawasan Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Kodya Jaksel) Sebutkan dan jelaskan secara singkat beberapa hasil survei lapangan melengkapi peta eksisting dan secara umum belum terjelaskan di peta eksisting	Potensi bencana di bentukan air, pendudukan lahan secara ilegal, ketidaksesuaian banguann dengan produk perencanaan, dll		
2.3	Peta kerja dibuat dengan skala sesuai ketentuan	2.3.1 Dapat menguraikan ketentuan teknis peta kerja peraturan zonasi			Uraikan ketentuan teknis pembuatan peta kerja peraturan zonasi	Beberapa ketentuan teknis peta kerja peraturan zonasi: - Menggunakan skala yang tepat untuk ukuran kota - Memiliki fitur geografis yang tepat (bentukan air, tebing, dll) - Memiliki zona-zona dasar sesuai RTRW - Dilengkapi dengan legenda		
		2.3.3 Mampu menggunakan teknik pembuatan peta kerja dengan tepat			Jelaskan teknik pembuatan peta kerja peraturan zonasi	Beberapa teknik pembuatan peta zonasi: - Didasarkan pada peta geografis tertentu		

								<ul style="list-style-type: none"> - Bentuk alam yang tidak signifikan disederhanakan - Dilengkapi dengan zona-zona dasar dari RTRW - Dilengkapi dengan keterangan dan legenda 	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Elemen Kompetensi: 3 Menyusun zona-zona dasar berdasarkan rujukan yang berlaku									
No.	Kriteria Unjuk Kerja (KUK)	Indikator Unjuk Kerja (IUK)	Aspek Kompetensi			Daftar Pertanyaan	Kunci Jawaban		
			K	S	A				
3.1	Fungsi dan karakteristik kabupaten/kota diidentifikasi dengan tepat	3.1.1 Dapat menguraikan jenis, fungsi, dan karakteristik kota/kabupaten				Uraikan jenis, fungsi, dan karakteristik Kodya Jakarta Selatan	<ul style="list-style-type: none"> - Salah satu Kodya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota yang memiliki fungsi komersial, perkantoran, hunian, dan konservasi lingkungan - Berada di ketinggian .. dpl - Memiliki beberapa bentukan air (sungai Ciliwung, Setu Babakan, dll), tidak memiliki pantai 		
		3.1.2 Mampu menjabarkan konteks kota/kabupaten dalam kerangka RTRWN dan RTRWP				Jabarkan konteks Kodya Jakarta Selatan dalam kerangka RTRWN dan RTRWP	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan pengendalian pembangunan - Kawasan hunian, komersial, dan perkantoran berkepadatan tinggi, menengah, dan rendah - Kawasan industri dengan luas sangat terbatas - Kawasan resapan air 		
		3.1.3 Mampu menjabarkan fungsi dan karakteristik kota/kabupaten sekitar dari RTRWN, RTRWP, dan RTRWK/RTRW Kabupaten				Jabarkan fungsi dan karakteristik kota/kabupaten sekitar berdasarkan RTRWN, RTRWRP, dan RTRWK/RTRW Kabupaten	<p>Kodya Jakarta Timur: Kawasan hunian, komersial, dan perkantoran berkepadatan rendah dan menengah</p> <p>Kodya Jakarta Pusat: Kawasan pemerintahan, perdagangan, dan perkantoran berkepadatan tinggi</p> <p>Kodya Jakarta Barat: Kawasan hunian, komersial, dan perkantoran berkepadatan</p>		

						<p>menengah dan tinggi</p> <p>Kodya Jakarta Utara: Kawasan hunian, perdagangan, dan industri berkepadatan menengah dan tinggi</p> <p>Kota Tangerang Selatan: Kawasan hunian, komersial, dan perkantoran berkepadatan rendah dan menengah, kawasan kota mandiri swasta</p> <p>Kabupaten Tangerang: Kawasan agrikultur</p> <p>Kota Depok: Kawasan hunian dan komersial berkepadatan rendah dan menengah</p>
3.2	Zona-zona utama dan zona-zona spesifik disusun berdasarkan fungsi dan karakteristik kota	3.2.1 Dapat menjabarkan zona-zona utama dan zona-zona spesifik berdasarkan fungsi serta karakteristik kota			Jabarkan zona-zona utama berdasarkan fungsi dan karakteristik Kodya Jakarta Selatan	<p>Pusat kegiatan primer/kawasan strategis provinsi: Pusat Niaga Terpadu Sudirman, Manggarai</p> <p>Pusat kegiatan sekunder/kawasan strategis kota: Blok M, Kawasan TOD Lebak Bulus, Kawasan TOD Pasar Minggu</p>
		3.2.2 Mampu menyusun daftar zona-zona utama dan spesifik			Sebutkan zona-zona spesifik berdasarkan fungsi dan karakteristik Kodya Jakarta Selatan	<p>Zona-zona spesifik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pusat Niaga Terpadu Sudirman - Kawasan TOD Manggarai - Kawasan wisata/konservasi lingkungan Kebun Binatang Ragunan - Kawasan Cagar Budaya Setu Babakan
3.3	Jenis-jenis penggunaan/peruntukan dan jenis-jenis perpetakan ditentukan mengacu kepada zona-zona spesifik	3.3.1 Dapat menguraikan jenis-jenis penggunaan/peruntukan			Uraikan jenis-jenis penggunaan/peruntukan di Kodya Jakarta Selatan	<ul style="list-style-type: none"> - Perumahan/Permukiman - Perdagangan dan Jasa - Taman Kota, Hutan Kota, Kawasan Terbuka Hijau Lainnya - Kawasan Terbuka Biru - Kawasan Perlindungan Daerah

						Bawah,
	3.3.2 Dapat menjabarkan jenis-jenis perpetakan				Jabarkan jenis-jenis perpetakan di Kodya Jakarta Selatan	Beberapa jenis perpetakan: <ul style="list-style-type: none"> - Petak yang dilayani infrastruktur - Petak yang tidak dilayani infrastruktur - Petak yang tidak untuk dibangun
	3.3.3 Mampu menyusun daftar serta diagram hirarki dan klasifikasi jenis penggunaan/peruntukan yang tepat				Jelaskan hirarki dan klasifikasi jenis penggunaan/peruntukan Kodya Jakarta Selatan	Contoh klasifikasi dan hirarki jenis peruntukan lahan? <ul style="list-style-type: none"> - Perumahan (R1-R8) - Komersial (K1-K6) - Ruang Terbuka Hijau (H1-H5) - Kawasan Lindung (KL1-KL6)

Elemen Kompetensi: 4 Mempersiapkan daftar kegiatan pada zona yang akan diatur							
No.	Kriteria Unjuk Kerja (KUK)	Indikator Unjuk Kerja (IUK)	Aspek Kompetensi			Daftar Pertanyaan	Kunci Jawaban
			K	S	A		
4.1	Daftar kegiatan dikumpulkan berdasarkan kajian literatur, peraturan perundangan, dan perbandingan berbagai contoh peraturan zonasi lain yang sudah disusun	4.1.1 Dapat mengidentifikasi daftar kegiatan yang sesuai dalam kerangka perundangan				Tentukan daftar kegiatan yang sesuai dalam kerangka perundangan	Daftar kegiatan yang ditentukan merujuk ke: <ul style="list-style-type: none"> - Standar Fasilitas Pelayanan Perkotaan/lingkungan PU - Petunjuk Perencanaan Kawasan Perumahan Dept PU - Keputusan Kepala Bapedal No. 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting
		4.1.2 Dapat mengklasifikasikan kegiatan berdasarkan rujukan RTRWN, RTRWP, dan RTRWK				Susunlah klasifikasi kegiatan berdasarkan RTRWN, RTRWP, dan RTRWK	Mengklasifikasikan megikuti Hirarki 1-5. Contoh: <ul style="list-style-type: none"> - Hirarki 1: B – Budidaya - Hirarki 2: BP – Kawasan permukiman - Hirarki 3: BPK – Permukiman perkotaan - Hirarki 4: BPK-1 – Perumahan - Hirarki 5: BPK-1-1 – Perumahan Tunggal

4.3	Daftar kegiatan disusun di atas peta kerja yang telah dibuat	4.3.1 Mampu menggunakan teknik penamaan kegiatan di atas peta kerja				Jelaskan teknik penamaan kegiatan di peta kerja	Ketentuan umum penamaan kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Mencerminkan kegiatan yang direpresentasikan - Disesuaikan dengan RTRW yang berlaku - Bersifat universal seperti yang banyak digunakan di dalam dan luar negeri
		4.3.2 Dapat melengkapi zona-zona utama dan zona-zona spesifik dengan kegiatan yang ditetapkan				Jelaskan kaitan zona-zona utama dan zona-zona spesifik dengan kegiatan yang ditetapkan di Kodya Jakarta Selatan	<i>Zona-zona utama dan zona-zona spesifik diberi kegiatan dengan merujuk pada daftar kegiatan yang telah ditetapkan.</i>
		4.3.3 Dapat menganalisis keterkaitan kegiatan antar zona				Jelaskan keterkaitan kegiatan antar zona tersebut	Kegiatan antar zona dianalisis secara sederhana dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> - Simbiosis/konflik antar kegiatan - Penggunaan sumber daya dan infrastruktur - Proses produksi yang terjadi, dll

MATERI UJI KOMPETENSI TEORI

JABATAN KERJA : Ahli Peraturan Zonasi
 UNIT KOMPETENSI : Menganalisis Informasi yang Relevan dengan Kegiatan Penyusunan Peraturan Zonasi
 KODE UNIT KOMPETENSI : F45.PZ01.002.02

Elemen Kompetensi: 1 Menganalisis jenis, tingkat, dan konsekuensi dampak kegiatan							
No.	Kriteria Unjuk Kerja (KUK)	Indikator Unjuk Kerja (IUK)	Aspek Kompetensi			Daftar Pertanyaan	Kunci Jawaban
			K	S	A		
1.1	Kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak diidentifikasi dengan tepat	1.1.1 Mampu menyusun daftar klasifikasi kegiatan berdasarkan tipe kegiatan				Sebutkan dan klasifikasikan kegiatan-kegiatan yang ada Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Kodya Jakarta Selatan berdasarkan tipe kegiatannya	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan permukiman diklasifikasikan berdasarkan jenis, fungsi, kepadatan, dsb - Kegiatan perdagangan diklasifikasikan berdasarkan jenis bangunan dan jenis barang - Fasilitas pelayanan di klasifikasikan berdasarkan jenis (pendidikan, kesehatan, rekreasi, dll)
		1.1.2 Dapat menjelaskan dampak normatif kegiatan berdasarkan tipe kegiatan				Jelaskan secara singkat dampak normatif kegiatan-kegiatan permukiman, perdagangan skala lingkungan, dan transportasi skala regional berdasarkan tipenya	Permukiman: meningkatkan kepadatan penduduk Perdagangan lingkungan: menimbulkan keramaian skala rendah Transportasi skala regional: menimbulkan keramaian skala tinggi, menghasilkan polusi udara dan suara
		1.1.3 Dapat menjabarkan secara spesifik dampak dari kegiatan terkait karakter spesifiknya				Jabarkan secara spesifik dampak dari kegiatan permukiman, lingkungan, dan transportasi skala regional di pertigaan Jl. M Kahfi II Kel. Jagakarsa Kodya Jaksel	Stasiun Lenteng Agung menimbulkan kepadatan pejalan kaki dan memicu angkutan kota untuk <i>ngetem</i> . Sebagian pengguna KRL adalah penghuni kawasan tersebut. Alfamart memanfaatkan kepadatan penduduk dan menghasilkan sedikit tambahan keramaian di jalan raya.

1.2	Dampak-dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dari kegiatan diinventarisasi dengan teliti	1.2.1 Mampu menghitung pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh kegiatan			Hitunglah pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh kegiatan permukiman, perdagangan skala lingkungan, dan transportasi skala regional	Menjelaskan: <ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan - Dampak terhadap pendapatan masyarakat - Dampak terhadap keuangan pemerintah daerah - Dampak terhadap peningkatan nilai ekonomis lahan
		1.2.2 Dapat menyusun prediksi dampak keamanan dan ketertiban lingkungan dari kegiatan			Prediksikan dampak keamanan dan ketertiban lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan permukiman, perdagangan skala lingkungan, dan transportasi skala regional	Menjelaskan: <ul style="list-style-type: none"> - Keramaian yang dihasilkan - Penghuni luar kawasan yang masuk
		1.2.3 Dapat menyusun prediksi dampak perubahan lingkungan dari kegiatan			Prediksikan dampak perubahan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan permukiman, perdagangan skala lingkungan, dan transportasi skala regional	Menjelaskan: <ul style="list-style-type: none"> - Polusi air, udara, bunyi, dan cahaya yang dihasilkan - Kualitas tanah, air, udara, dan elemen lingkungan lain yang berubah
		1.2.4 Dapat menyusun prediksi dampak lalu lintas dari kegiatan			Prediksikan dampak lalu lintas yang ditimbulkan oleh kegiatan permukiman, perdagangan skala lingkungan, dan transportasi skala regional	Menjelaskan: <ul style="list-style-type: none"> - Volume tarikan dan bangkitan yang ditimbulkan oleh kegiatan - Pengaruh dampak tersebut pada sistem transportasi kawasan - Jalur sirkulasi, parker, dan kemacetan - Fasilitas transportasi umum - Andal Lalin
1.3	Kategori tingkat gangguan dan kategori tingkat perubahan gangguan diidentifikasi dengan tepat	1.3.1 Dapat menguraikan berbagai tingkat gangguan dan tingkat perubahan gangguan beserta kategorinya			Uraikan berbagai tingkat gangguan dan tingkat perubahan gangguan beserta kategorinya	Kategori gangguan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Intensitas gangguan tinggi 2. Intensitas gangguan sedang 3. Intensitas gangguan rendah 4. Tidak ada gangguan Kategori perubahan tingkat gangguan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunkan tingkat gangguan 2. Tingkat gangguan tetap 3. Meningkatkan tingkat gangguan
		1.3.2 Mampu menyusun daftar kategori tingkat gangguan yang dihasilkan oleh kegiatan berdasarkan			Simpulkan kategori tingkat gangguan yang dihasilkan oleh kegiatan permukiman, perdagangan skala lingkungan,	<i>Kesimpulan kategori tingkat gangguan diambil berdasarkan analisis dampak yang lengkap dan komprehensif.</i>

		analisis dampak kegiatan				dan transportasi skala regional berdasarkan analisis dampak kegiatan yang telah dilakukan	
		1.3.3 Dapat memberi prediksi kategori tingkat perubahan gangguan yang dihasilkan oleh perubahan kegiatan				Prediksikan kategori tingkat perubahan gangguan yang dihasilkan oleh perubahan kegiatan permukiman, perdagangan skala lingkungan, dan transportasi skala regional	<i>Kesimpulan kategori tingkat gangguan diambil berdasarkan analisis dampak yang lengkap dan komprehensif.</i>
1.4	Biaya yang ditimbulkan akibat dampak kegiatan dihitung dengan cermat	1.4.1 Dapat menjabarkan mekanisme perhitungan biaya berbagai dampak kegiatan				Jabarkan mekanisme perhitungan biaya dari berbagai dampak kegiatan permukiman, perdagangan skala lingkungan, dan transportasi skala regional	Mekanisme perhitungan harus didasarkan pada perhitungan biaya dan manfaat dari suatu pembangunan atau pemanfaatan ruang
		1.4.2 Mampu menghitung biaya yang ditanggung masyarakat akibat gangguan ketertiban, keamanan, kesehatan, lalu lintas, serta turunnya kualitas lingkungan				Hitunglah biaya yang ditanggung masyarakat akibat gangguan ketertiban, keamanan, kesehatan, lalu lintas, serta turunnya kualitas lingkungan	Memperhitungkan: 1. Kerugian ekonomi yang dialami masyarakat di sekitar kawasan fungsional 2. Kerugian akibat gangguan ketertiban, keamanan, dan kesehatan 3. Kerugian akibat menurunnya kualitas lingkungan 4. Kerugian akibat terhambatnya sirkulasi 5. Kebutuhan masyarakat akibat berkembangnya kegiatan tertentu 6. Kebutuhan masyarakat untuk mengurangi dampak akibat kegiatan tertentu
		1.4.3 Dapat memprediksi luas kawasan yang terkena dampak kegiatan				Prediksikan luas kawasan yang terkena dampak kegiatan tersebut	<i>Prediksi luas kawasan setidaknya mencakup dampak masing-masing kegiatan dan dampak dari irisan kegiatan.</i>

Elemen Kompetensi: 2 Mengkaji kesesuaian daya dukung lahan dengan pengembangan kegiatan							
No.	Kriteria Unjuk Kerja (KUK)	Indikator Unjuk Kerja (IUK)	Aspek Kompetensi			Daftar Pertanyaan	Kunci Jawaban
			K	S	A		
2.1	Ketersediaan lahan (<i>land availability</i>) dan kapasitas lahan (<i>land capacity</i>) diidentifikasi berdasarkan daftar kegiatan yang telah disusun	2.1.1 Mampu menyusun daftar inventaris lahan yang tersedia beserta kapasitasnya dalam lingkup kota				(Diberikan peta geografis Kel. Jagakarsa Kodya Jaksel) Inventarisasikan lahan yang tersedia beserta kapasitasnya di Kel. Jagakarsa Kodya Jaksel	Lahan yang diinventarisasi setidaknya mencakup: - Lahan kosong/tidak produktif - Lahan yang

						<p><i>penggunaannya tidak sesuai peruntukan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Lahan yang penggunaannya sesuai peruntukan dan dapat dikembangkan lebih lanjut</i>
		2.1.2 Dapat menghitung kebutuhan lahan untuk setiap kegiatan			(Diberikan peta geografis Kel. Jagakarsa Kodya Jaksel) Hitunglah kebutuhan lahan untuk setiap pengembangan kegiatan permukiman, perdagangan skala lingkungan, dan transportasi skala regional	<p><i>Kebutuhan lahan setidaknya didasarkan pada:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Dampak masing-masing kegiatan</i> - <i>Dampak gabungan kegiatan</i> - <i>Kemungkinan perkembangan kegiatan di masa depan</i>
2.2	Prasyarat ketersediaan infrastruktur untuk setiap kegiatan diidentifikasi dengan tepat	2.2.1 Mampu menyusun daftar prasyarat sarana dan prasarana untuk kegiatan			Uraikan prasyarat sarana dan prasarana untuk kegiatan permukiman, perdagangan skala lingkungan, dan transportasi skala regional'	<p>Menjelaskan setidaknya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertimbangan parkir - Pertimbangan bongkar-muat, dll
		2.2.2 Mampu menyusun daftar kebutuhan infrastruktur untuk setiap kegiatan			Inventarisasikan kebutuhan infrastruktur untuk kegiatan tersebut	<p>Menjelaskan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan listrik dan bahan bakar - Kebutuhan air bersih - Kebutuhan pembuangan limbah, dll
		2.2.3 Dapat mengaitkan kebutuhan prasyarat sarana dan prasarana serta infrastruktur antar kegiatan			Kaitkan kebutuhan infrastruktur dari gabungan kegiatan tersebut	<p>Menjelaskan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan ruang antara kegiatan transportasi skala regional dan permukiman - Kebutuhan jalur pejalan kaki antara kegiatan permukiman, perdagangan, dan transportasi
2.3	Tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan daya dukung lahan diperiksa dengan cermat	2.3.1 Mampu menyusun kriteria daya dukung lahan			Jelaskan kriteria daya dukung lahan untuk kegiatan permukiman, perdagangan skala lingkungan, dan transportasi skala regional'	<p>Menjelaskan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keadaan tanah, air, dan udara - Ketersediaan infrastruktur di lahan
		2.3.2 Dapat menyimpulkan			Simpulkan kesesuaian daya dukung lahan	<i>Kesimpulan kesesuaian daya</i>

		kesesuaian daya dukung lahan untuk setiap kegiatan dan gabungan kegiatan				kegiatan-kegiatan tersebut	<i>dukung lahan didasarkan pada kebutuhan tiap kegiatan dan daya dukung lahan</i>
--	--	--	--	--	--	----------------------------	---

Elemen Kompetensi: 3 Mengkaji kegiatan dalam zona							
No.	Kriteria Unjuk Kerja (KUK)	Indikator Unjuk Kerja (IUK)	Aspek Kompetensi			Daftar Pertanyaan	Kunci Jawaban
			K	S	A		
3.1	Kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak dipetakan berdasarkan tingkat gangguan	3.1.1 Dapat mengidentifikasi kegiatan yang menimbulkan dampak				(Diberikan studi kasus Kel. Jagakarsa Kodya Jaksel) Sebutkan kegiatan yang dapat menimbulkan dampak signifikan	Kemungkinan kegiatan: - Transportasi skala regional (Stasiun Lenteng Agung) - Industri-industri skala rumah (<i>home industry</i>)
		3.1.2 Mampu menyusun daftar kegiatan beserta dampaknya				Susunlah daftar kegiatan yang dapat menimbulkan dampak signifikan	<i>Daftar kegiatan disusun berdasarkan besar dan intensitas dampak yang dihasilkan</i>
		3.1.3 Dapat mengaitkan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan dampak				Jelaskan keterkaitan antara kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan dampak signifikan	Misal: - Keterkaitan antara industri skala rumah dengan infrastruktur transportasi skala regional - Keterkaitan antara industri skala rumah dengan permukiman berkepadatan rendah
3.2	Tingkat persesuaian (<i>conformity</i>) kegiatan dalam zona ditentukan berdasarkan kegiatan yang sudah dipetakan	3.2.1 Dapat menjelaskan jenis-jenis <i>non-conformity</i> kegiatan.				Jelaskan jenis-jenis <i>non-conformity</i> yang umum terjadi	Beberapa jenis <i>non-conformity</i> yang umum terjadi - Daerah pinggir sungai digunakan sebagai industri - Daerah resapan air digunakan sebagai daerah permukiman
		3.2.2 Mampu menyusun daftar kegiatan-kegiatan yang <i>non-conforming</i> .				(Menggunakan daftar kegiatan yang telah disusun sebelumnya) Inventarisasikan kegiatan-kegiatan yang <i>non-conforming</i> pada daftar kegiatan tersebut	<i>Kegiatan-kegiatan non-conforming diidentifikasi dan diklasifikasi berdasarkan jenis-jenis non-conformity yang umum</i>
3.3	Tingkat keserasian (<i>compatibility</i>) antara kegiatan dengan klasifikasi zonadiperiksa dengan cermat.	3.3.1 Dapat menjelaskan jenis-jenis ketidakserasian (<i>incompatibility</i>)				Jelaskan jenis-jenis ketidakserasian (<i>incompatibility</i>) yang umum terjadi	Beberapa jenis <i>non-conformity</i> yang umum terjadi: - Kegiatan industri berdampingan dengan permukiman dan fasilitas sosial

							- Kegiatan industri berdampingan dengan daerah resapan air
		3.3.2 Mampu menyusun daftar ketidakserasian (<i>incompatibility</i>) antara kegiatan dengan zona				(Diberikan peta Kel. Jagakarsa Kodya Jaksel serta menggunakan daftar kegiatan yang telah disusun sebelumnya) Inventarisasikan kegiatan-kegiatan dalam daftar kegiatan yang tidak serasi pada peta	Kegiatan-kegiatan yang tidak serasi diinventarisasikan dan diklasifikasi berdasarkan jenis-jenis ketidakserasian yang umum
		3.3.3 Dapat menganalisis zona-zona yang mendukung/tidak mendukung kegiatan tertentu				Sebutkan dan jelaskan zona-zona yang mendukung/tidak mendukung kegiatan dalam daftar kegiatan	Zona-zona yang mendukung/tidak mendukung kegiatan dalam daftar kegiatan dijelaskan dengan mempertimbangkan dampak kegiatan dan jenis-jenis ketidakserasian

Elemen Kompetensi: 4 Merumuskan penanganan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai (<i>incompatible</i> atau <i>nonconforming</i>) dengan karakteristik zona							
No.	Kriteria Unjuk Kerja (KUK)	Indikator Unjuk Kerja (IUK)	Aspek Kompetensi			Daftar Pertanyaan	Kunci Jawaban
			K	S	A		
4.1	Tingkat keserasian (<i>compatibility</i>) kegiatan ditentukan berdasarkan jenis, tingkat dan konsekuensi dampak.	4.1.1 Dapat menguraikan jenis, tingkat dan konsekuensi dampak				Uraikan jenis, tingkat, dan konsekuensi dampak kegiatan yang umum digunakan	Menjelaskan: <ul style="list-style-type: none"> - Dampak kegiatan dari berbagai aspek (ekonomi, keamanan dan ketertiba, lingkungan, dll) - Tingkat dampak (tinggi, sedang, rendah, dapat diabaikan)
		4.1.2 Mampu menggunakan teknik dan rujukan analisis dampak				Berikan contoh analisis dampak berdasarkan teknik dan rujukan tertentu	Rujukan analisis dampak: <ul style="list-style-type: none"> - Dampak sosial, keamanan, dan ketertiban: Undang-undang Gangguan (hinderodnantie) stbl Tahun 1926 No. 226 - Dampak lingkungan: Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana - Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak

						Lingkungan no.56 tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting
		4.1.3 Dapat menentukan obyek, cakupan, dan biaya pengenaan dampak kegiatan			(Menggunakan daftar kegiatan yang telah disusun sebelumnya) Tentukan obyek, cakupan, dan biaya pengenaan dampak dari kegiatan permukiman, perdagangan skala lingkungan, dan transportasi skala regional	Obyek, cakupan, dan biaya pengenaan dampak ditentukan berdasarkan rujukan yang tepat
		4.1.4 Dapat menyimpulkan tingkat dampak kegiatan			Simpulkanlah dampak kegiatan	Dampak kegiatan disimpulkan berdasarkan analisis obyek, cakupan, dan biaya pengenaan dampak serta rujukan yang tepat
4.2	Kegiatan-kegiatan dikelompokkan dalam kriteria bebas, bersyarat, terbatas dan dilarang sama sekali berdasarkan tingkat kesesuaian (<i>compatibility</i>).	4.2.1 Dapat menguraikan karakteristik kegiatan bebas, bersyarat, terbatas dan dilarang sama sekali			Uraikan karakteristik kegiatan bebas, bersyarat, terbatas dan dilarang sama sekali	Karakteristik kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Bebas: Dapat dilakukan sesuai aturan - Bersyarat: Dapat dilakukan dengan melengkapi tambahan perizinan, membayar tambahn pajak, dsb - Terbatas: Hanya dapat dilakukan di waktu, tempat, dan keadaan tertentu - Dilarang sama sekali: Tidak dapat dilakukan
		4.2.2 Dapat menjabarkan kriteria pengelompokan kegiatan bebas, bersyarat, terbatas dan dilarang sama sekali			Jabarkan kriteria pengelompokan kegiatan bebas, bersyarat, terbatas dan dilarang sama sekali	Pertimbangan kriteria: <ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian dengan pemanfaatan ruang utama di kawasan - Kerugian/gangguan yang dihasilkan terhadap masyarakat di sekitar kawasan - Tingkat kepentingannya terhadap kebutuhan publik - Pertimbangan sosial budaya
		4.2.3 Mampu menyusun parameter penetapan kriteria kelompok			Tetapkan parameter penetapan kriteria kelompok kegiatan	Parameter penetapan didasarkan pada besar dan intensitas dampak kegiatan

		kegiatan					
4.3	Penanganan kegiatan yang bersyarat, terbatas dan dilarang, dirumuskan dengan cermat	4.3.1 Dapat menguraikan jenis-jenis penanganan kegiatan yang bersyarat, terbatas dan dilarang.				Uraikan jenis-jenis penanganan kegiatan yang bersyarat, terbatas dan dilarang	Menguraikan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Perizinan yang harus didapatkan - Biaya dampak yang harus dibayar - Insentif dan disinsentif yang dikenakan
		4.3.2 Mampu memberi prediksi kemungkinan dampak penetapan kriteria kegiatan				Prediksikan kemungkinan dampak penetapan kriteria kegiatan	Menjelaskan: <ul style="list-style-type: none"> - Kuantitas dan skala kegiatan - Besar dampak kegiatan

MATERI UJI KOMPETENSI TEORI

JABATAN KERJA : Ahli Peraturan Zonasi
UNIT KOMPETENSI : Merumuskan Dokumen Teknis Peraturan Zonasi
KODE UNIT KOMPETENSI : F45.PZ01.002.03

Elemen Kompetensi: 1 Merumuskan klasifikasi zona							
No.	Kriteria Unjuk Kerja (KUK)	Indikator Unjuk Kerja (IUK)	Aspek Kompetensi			Daftar Pertanyaan	Kunci jawaban
			K	S	A		
1.1	Zona-zona dasar yang sudah dan akan berkembang serta zona spesifik diidentifikasi dengan tepat	1.1.1 Mampu menyusun daftar klasifikasi fungsi utama kawasan berdasarkan RTRWP				Inventarisasikan klasifikasi fungsi utama Kel. Jagakarsa Kodya Jaksel berdasarkan RTRWP	Permukiman diklasifikasikan berdasarkan jenis, fungsi, kepadatan, dan nilai Perdagangan diklasifikasikan berdasarkan jenis tempat dan jenis barang yang diperdagangkan Fasilitas Pelayanan diklasifikasikan berdasarkan jenis (pendidikan, sosial, dll)
		1.1.2 Mampu menyusun daftar klasifikasi zona berdasarkan RTRWP dan RTRW Kota/Kabupaten				Inventarisasikan klasifikasi zona-zona di Kel. Jagakarsa Kodya Jaksel berdasarkan RTRWP	Residensial: R1-R4, R8 Perdagangan: K3-K6 Fasilitas Pelayanan: FP3-FP6 Ruang Terbuka Hijau: H1-H5, dll
		1.1.3 Dapat menjelaskan zona spesifik yang belum ada di peraturan				Jelaskan secara singkat zona-zona spesifik yang belum ada di peraturan	Menjelaskan tentang: - Kawasan cagar budaya Setu Babakan - Kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia
1.2	Karakterisasi zona-zona dasar dirumuskan berdasarkan kualitas minimum yang ditetapkan	1.2.1 Mampu menyusun kriteria perumusan kualitas minimum				Jelaskan secara singkat kriteria perumusan kualitas minimum	Menjelaskan setidaknya: - Bentuk, ukuran, dan skala kegiatan/layanan yang dapat dilakukan dalam suatu zona

						<ul style="list-style-type: none"> - Karakteristik umum bangunan fisik yang boleh dibangun - Jenis, ukuran, dan skala dampak/gangguan yang akan dihasilkan
		1.2.2 Dapat menjelaskan batas perumusan kualitas minimum untuk setiap hirarki kategori zona			Jelaskan secara singkat batas perumusan kualitas minimum untuk setiap hirarki kategori zona	Misal: <ul style="list-style-type: none"> - Hirarki 1: Fungsi umum zona - Hirarki 2: Skala layanan zona - Hirarki 3: Bentuk bangunan dalam zona, dst
1.3	Kodifikasi dan notasi zona-zona dasar ditentukan berdasarkan rujukan yang berlaku	1.3.1 Mampu menggunakan teknik kodifikasi zona-zona dasar			Uraikan secara singkat teknik kodifikasi zona-zona dasar yang umum digunakan	Memperhatikan: <ul style="list-style-type: none"> - Hirarki antar zona - Kemiripan, kedekatan, dan keterkaitan antar zona
		1.3.2 Mampu menggunakan teknik notasi zona-zona dasar			Uraikan secara singkat teknik notasi zona-zona dasar yang umum digunakan	Memperhatikan: <ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian dan kespesifikan antara nama dengan zona yang diwakilkan - Kemudahan pengidentifikasian zona-zona tertentu - Kesesuaian dengan RTRW yang berlaku di daerah masing-masing

Elemen Kompetensi: 2 Membuat delineasi zona							
No.	Kriteria Unjuk Kerja (KUK)	Indikator Unjuk Kerja (IUK)	Aspek Kompetensi			Daftar Pertanyaan	Kunci jawaban
			K	S	A		
2.1	Zona-zona dasar ditentukan berdasarkan kondisi fisik dan rencana tata ruang	2.1.1 Mampu menjelaskan kondisi fisik berdasarkan hasil survey lapangan				(Diberikan contoh hasil survei) Jabarkan kondisi fisik Kel. Jagakarsa Kodya Jaksel	Kondisi fisik yang dijabarkan setidaknya merupakan kondisi fisik yang secara umum akan mempengaruhi kegiatan yang ada di daftar kegiatan, misal: ketersediaan air bersih, ketersediaan udara dan cahaya matahari, arah dan kecepatan angin, dll
		2.1.2 Dapat menguraikan rencana tata ruang yang berlaku				Uraikan rencana tata ruang Kel. Jagakarsa Kodya Jaksel	Rencana tata ruang diuraikan dengan detail hingga ke skala mendekati skala peraturan zonasi yang akan disusun
		2.1.3 Dapat mencocokkan zona dengan karakter fisik				Sesuaikan zona permukiman, perdagangan skala	Zona-zona disesuaikan berdasarkan kesesuaian antara kondisi fisik dengan kegiatan

		tertentu			lingkungan, dan transportasi skala regional dengan karakter fisik tertentu	yang diakomodasi oleh zona tersebut
2.2	Zona-zona dasardinotifikasi berdasarkan referensi geografis (<i>georeference</i>)	2.2.2 Dapat menguraikan teknik notifikasi pada blok dan sub-blok			Uraikan secara singkat teknik notifikasi pada blok dan sub-blok yang umum digunakan	Penggunaan huruf a, b, c, dst, sesudah nomor blok berdasarkan <i>georeference</i> .
2.3	Zona dasar ditentukan berdasarkan fungsi yang ditetapkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah / Rencana Detail Tata Ruang	2.3.2 Dapat menguraikan kriteria penentuan zona dasar berdasarkan fungsi kota			Uraikan secara singkat kriteria penentuan zona dasar berdasarkan fungsi kota	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas zona tidak bertentangan dengan fungsi kota yang telah ditetapkan - Kualitas zona menspesifikkan fungsi kota - Zona memberi batasan spesifik atas pelaksanaan fungsi kota
		2.3.3 Mampu menyusun daftar inventaris zona-zona dasar yang dapat digunakan untuk memperjelas fungsi kota tertentu			Inventarisasikan zona-zona dasar yang dapat digunakan untuk memperjelas fungsi Kel. Jagakarsa Kodya Jaksel	<p>Misal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kawasan pengendalian pembangunan: zona permukiman berkepadatan rendah, zona perdagangan berskala lingkungan - Kawasan cagar budaya: zona fasilitas umum/sosial berskala lingkungan, zona taman kota
2.4	Delineasi Zonadibuat berdasarkan ketentuan yang berlaku	2.4.1 Mampu menggunakan teknik delineasi zona berdasarkan ketentuan yang berlaku			Uraikan secara singkat dan berikan contoh teknik delineasi zona berdasarkan ketentuan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan batasan fisik alam (sungai, pantai), jaringan infrastruktur (jalan, irigasi), atau rencana jaringan infrastruktur - Memisahkan suatu zona dengan zona lain secara jelas
		2.4.2 Dapat menarik batas yang jelas antar zona serta menganalisis dampaknya terhadap kinerja zona			Berikan analisis dampak batas zona permukiman berkepadatan rendah X dan perdagangan skala lingkungan Y terhadap kinerja zona tersebut	<p>Menjelaskan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akses/hubungan zona terhadap bentukan alam/infrastruktur/zona lain - Kualitas fisik zona yang dipengaruhi oleh bangunan di zona lain

Elemen Kompetensi: 3 Merumuskan aturan teknis zonasi							
No.	Kriteria Unjuk Kerja (KUK)	Indikator Unjuk Kerja (IUK)	Aspek Kompetensi			Daftar Pertanyaan	Kunci jawaban
			K	S	A		
3.1	Ketentuan teknis pemanfaatan ruang untuk kegiatan pada suatu zona yang bebas, bersyarat, terbatas dan dilarang sama	3.1.1 Dapat menguraikan anatomi ketentuan teknis pemanfaatan ruang				Uraikan secara singkat anatomi ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang umum digunakan	<p>Menyertakan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Status pemanfaatan ruang - Kegiatan yang dapat dan tidak dapat dilaksanakan di zona - Aturan yang harus dipatuhi dalam

	sekali dirumuskan dengan cermat.					pemanfaatan ruang
		3.1.2 Dapat menjabarkan kriteria perumusan ketentuan teknis			Jabarkan secara singkat kriteria perumusan ketentuan teknis	Menjabarkan setidaknya: - Keadaan ideal, keadaan yang dapat ditoleransikan, dan keadaan yang tidak boleh terjadi di zona - Tujuan yang diharapkan dari penerapan ketentuan teknis
		3.1.3 Mampu menggunakan pendekatan penyusunan aturan teknis yang tepat			Jelaskan secara singkat dan berikan contoh pendekatan penyusunan aturan teknis yang umum digunakan	Aspek yang dipertimbangkan: - Fungsional - Kesehatan - Keselamatan, keamanan, kenyamanan, keindahan, dll Komponen yang diatur: KDB, KLB, kepadatan bangunan
		3.1.4 Dapat menentukan jenis aturan teknis yang tepat			Sebutkan dan jelaskan secara singkat jenis aturan teknis yang tepat digunakan di DKI Jakarta	Jenis aturan teknis yang dapat disebut dan jelaskan: - Peraturan preskriptif - Peraturan kinerja
3.2	Intensitas bangunan ditentukan berdasarkan aspek fungsional, kesehatan dan keselamatan untuk setiap kode zonasi	3.2.1 Dapat menguraikan berbagai instrumen pengendalian intensitas bangunan			Uraikan secara singkat berbagai instrumen pengendalian intensitas bangunan yang umum digunakan	Menguraikan antara lain: - Koefisien Dasar Bangunan - Koefisien Lantai Bangunan - Koefisien Dasar Hijau - Koefisien Tapak Basemen - Koefisien Wilayah Terbangun - Kepadatan bangunan - Unit terbangun - Kepadatan penduduk minimum
		3.2.2 Dapat menjabarkan berbagai aspek fungsional, kesehatan dan keselamatan sebagai tujuan pengendalian			Jabarkan secara singkat berbagai aspek fungsional, kesehatan dan keselamatan sebagai tujuan pengendalian	Menjabarkan antara lain: - Aspek fungsional: harga lahan, ketersediaan sarana transportasi, dll - Aspek kesehatan: kebutuhan cahaya matahari bagi sekitar, perlindungan dari polusi debu, dll - Aspek keselamatan: pencegahan keruntuhan, pencegahan longsor, dll - Aspek sosial: privasi bangunan, ruang publik, dll
		3.2.3 Mampu menyusun daftar aturan baku			Jelaskan secara singkat pertimbangan penentuan dan	Pertimbangan penentuan aturan baku intensitas bangunan didasarkan pada

		intensitas bangunan (KDB, KLB, KDH)			berikan contoh aturan baku intensitas bangunan (KDB, KLB, KDH) berdasarkan tujuan pengendalian	aspek fungsional, kesehatan, keselamatan, sosial, dll.
		3.2.4 Mampu menyusun daftar aturan tambahan intensitas bangunan (KTB, KWT, kepadatan bangunan, unit maksimum, kepadatan penduduk minimum)			Jelaskan secara singkat pertimbangan penentuan dan berikan contoh aturan tambahan intensitas bangunan (KTB, KWT, kepadatan bangunan, unit maksimum, kepadatan penduduk minimum) berdasarkan tujuan pengendalian	Pertimbangan penentuan aturan tambahan intensitas bangunan didasarkan pada aspek fungsional, kesehatan, keselamatan, sosial, dll.
3.3	Tata Massabangunan ditentukan berdasarkan aspek fungsional, kesehatan dan keselamatan untuk setiap kode zonasi	3.3.1 Dapat menguraikan berbagai instrumen pengendalian tata massa bangunan			Uraikan secara singkat berbagai instrumen pengendalian tata massa bangunan yang umum digunakan	Menguraikan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Garis sempadan bangunan/jalan/sungai - Jarak bebas bangunan - Tinggi bangunan maksimum/minimum - Amplop bangunan, dll
		3.3.2 Dapat menjabarkan berbagai aspek fungsional, kesehatan dan keselamatan sebagai tujuan pengendalian			Jabarkan secara singkat berbagai aspek fungsional, kesehatan dan keselamatan sebagai tujuan pengendalian	Menjabarkan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Aspek fungsional: Kegiatan yang diakomodasi, kebutuhan ruang parkir/<i>loading dock</i>, utilitas limbah (<i>septic tank</i>), sarana yang tersedia - Aspek kesehatan: paparan polusi udara - Aspek keselamatan: pencegahan kebakaran, pencegahan longsor, dll - Aspek estetika: keserasian dengan lingkungan, dll
		3.3.3 Mampu menyusun daftar GSB dan jarak bebas bangunan			Jelaskan secara singkat berbagai pertimbangan penentuan serta berikan contoh GSB dan jarak bebas bangunan berdasarkan berbagai aspek yang telah dibahas	Pertimbangan penentuan GSB dan jarak bebas bangunan didasarkan pada aspek fungsional, kesehatan, keselamatan, estetika, dll.
		3.3.4 Mampu menyusun daftar tinggi, amplop, dan tampilan bangunan			Jelaskan secara singkat berbagai pertimbangan penentuan serta berikan contoh tinggi, amplop, dan tampilan bangunan berdasarkan	Pertimbangan penentuan tinggi, amplop, dan tampilan bangunan didasarkan pada aspek fungsional, kesehatan, keselamatan, estetika, dll.

						berbagai aspek yang telah dibahas	
3.4	Sarana dan Prasarana pada tiap zona ditentukan berdasarkan aspek fungsional, kesehatan dan keselamatan untuk setiap kode zonasi	3.4.1 Dapat menguraikan berbagai instrumen pengendalian sarana dan prasarana bangunan				Uraikan secara singkat berbagai instrumen pengendalian sarana dan prasarana bangunan yang umum digunakan	Menguraikan setidaknya: <ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan parkir - Kebutuhan bongkar muat - Kebutuhan prasarana jalan dan kelengkapannya (<i>streetscape</i>) - Kebutuhan prasarana drainase
		3.4.3 Mampu menyusun daftar kebutuhan prasarana parkir, bongkar-muat, serta dimensi dan kelengkapan jalan				Uraikan secara singkat kebutuhan prasarana parkir, bongkar-muat, serta dimensi dan kelengkapan jalan bagi zona permukiman kepadatan rendah dan perdagangan skala lingkungan.	Pertimbangan kebutuhan prasarana parkir, bongkar-muat, serta dimensi dan kelengkapan jalan setidaknya didasarkan pada kegiatan yang akan terjadi di dalam zona serta rencana tata ruang kota yang berlaku.
		3.4.4 Mampu menyusun daftar kebutuhan prasarana lainnya				Uraikan secara singkat kebutuhan prasarana lain bagi zona permukiman kepadatan rendah dan perdagangan skala lingkungan.	Pertimbangan kebutuhan prasarana lain setidaknya didasarkan pada kegiatan yang akan terjadi di dalam zona serta rencana tata ruang kota yang berlaku.

Elemen Kompetensi: 4 Merumuskan standar teknis							
No.	Kriteria Unjuk Kerja (KUK)	Indikator Unjuk Kerja (IUK)	Aspek Kompetensi			Daftar Pertanyaan	Kunci jawaban
			K	S	A		
4.1	Kebutuhan standar teknis diidentifikasi dengan tepat	4.1.1 Dapat menjelaskan jenis-jenis standar teknis				Sebutkan dan jelaskan secara singkat jenis-jenis standar teknis yang umum digunakan	Jenis-jenis standar teknis: <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar preskriptif: <ul style="list-style-type: none"> - Standar kuantitatif - Standar desain 2. Standar kinerja: <ul style="list-style-type: none"> - Standar subyektif - Standar kualitatif
		4.1.2 Dapat menguraikan kebutuhan terhadap standar teknis				Jelaskan secara singkat kebutuhan terhadap standar teknis atas Kel. Jagakarsa Kodya Jaksel	Menjelaskan setidaknya aspek-aspek/bagian-bagian kegiatan di dalam zona yang perlu diatur terkait dengan dampak yang akan dihasilkan.
		4.1.3 Dapat menganalisis syarat-syarat kesehatan, keamanan, keselamatan, lingkungan,				Jabarkan secara singkat analisis syarat-syarat kesehatan, keamanan, keselamatan, lingkungan, perkembangan	Analisis merujuk pada rujukan yang tepat (Time Saver Standards, Architect's Data, UU

		perkembangan IPTEK, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan mendatang dari sebuah zona			IPTEK, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan mendatang dari zona permukiman kepadatan rendah, perdagangan skala lingkungan, dan transportasi skala regional.	No. 28/2002, dll) Mempertimbangkan setidaknya: - Karakteristik alam wilayah - Karakteristik sosial-budaya masyarakat - Arah pengembangan wilayah
		4.1.4 Mampu menyusun daftar inventaris zona-zona yang membutuhkan standar teknis			Inventarisasikan kriteria zona yang membutuhkan standar teknis	Mempertimbangkan antara lain: - Zona-zona dengan kegiatan yang berpotensi menimbulkan masalah bila tidak diatur dengan standar teknis yang tepat - Zona-zona dengan kegiatan yang dapat meningkatkan nilai kawasan bila diatur dengan standar teknis yang tepat
4.2	Standar teknis yang tersedia dievaluasi berdasarkan kebutuhan kabupaten/kota	4.2.1 Dapat mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan suatu standar teknis			Jelaskan secara singkat kelebihan dan kelemahan dari berbagai standar teknis yang umum digunakan	Standar preskriptif: (+) Memberikan panduan yang ketat dan rinci, (-) Membatasi arsitek dalam menuangkan kreasinya Standar kinerja: (+) Memberi kebebasan pada arsitek dalam merancang, (-) Dapat tidak efektif dalam memberi batasan
		4.2.2 Mampu menyusun kriteria evaluasi standar teknis			Jelaskan secara singkat beberapa kriteria evaluasi standar teknis	Menjelaskan antara lain: - Dampak yang dihasilkan oleh standar teknis yang berlaku - Tingkat pelanggaran standar teknis
		4.2.4 Dapat menganalisis efektifitas dan efisiensi standar teknis yang telah diterapkan			Jelaskan secara singkat analisis efektifitas dan efisiensi beberapa standar teknis yang umum digunakan	Menjelaskan antara lain: - Prediksi bangunan yang akan berdiri beserta kegiatan yang akan diwadahi

							- Dampak bangunan terhadap kawasan
4.3	Standar teknis dipilih berdasarkan hasil evaluasi	4.3.1 Dapat menentukan kriteria pemilihan standar teknis				Jelaskan secara singkat kriteria pemilihan standar teknis yang umum diperhatikan	Menjelaskan setidaknya: - Tujuan yang ingin dicapai dengan penetapan standar teknis - Kesesuaian dengan karakteristik alam kawasan - Keseuaian dengan karakteristik sosial dan budaya - Metode perhitungan standar dan tingkat kesalahan yang mungkin terjadi
		4.3.2 Mampu menyusun standar dengan jenis yang lazim digunakan (preskriptif, kinerja, campuran)				Jelaskan secara singkat dasar penyusunan standar teknis dengan jenis yang lazim digunakan (preskriptif, kinerja, campuran)	Menjelaskan setidaknya kriteria pemilihan yang telah dijelaskan sebelum
4.4	Standar teknis yang belum tersedia dirumuskan secara rinci	4.4.1 Dapat menguraikan tujuan perumusan standar teknis untuk setiap zona yang membutuhkan				Uraikan secara singkat tujuan perumusan standar teknis untuk zona permukiman kepadatan rendah dan perdagangan skala lingkungan.	Tujuan perumusan standar teknis setidaknya didasarkan pada kegiatan yang akan terlaksana di dalam zona beserta dampaknya.
		4.4.4 Mampu menyusun standar teknis dengan merujuk pada SNI serta ketentuan sektoral dan lokal lainnya.				Susunlah contoh standar teknis untuk zona X, Y, dan Z dengan merujuk pada SNI serta ketentuan sektoral dan lokal lainnya	- Merujuk pada daftar SNI yang dicantumkan di Panduan Penyusunan Peraturan Zonasi - Mengacu pada RTRWK dan RDTRK

Elemen Kompetensi: 5 Menentukan teknik peraturan zonasi berdasarkan tujuan pengaturan							
No.	Kriteria Unjuk Kerja (KUK)	Indikator Unjuk Kerja (IUK)	Aspek Kompetensi			Daftar Pertanyaan	Kunci jawaban
			K	S	A		
5.1	Zona yang membutuhkan peraturan-peraturan khusus diidentifikasi dengan tepat	5.1.1 Dapat menguraikan jenis-jenis peraturan khusus				Uraikan secara singkat jenis-jenis peraturan khusus yang umum digunakan	- Aturan untuk Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) - Aturan untuk kawasan cagar budaya - Aturan untuk kawasan rawan bencana
		5.1.2 Dapat menginventarisasi beberapa rujukan terkait				Sebutkan beberapa rujukan terkait peraturan-peraturan	- Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 49/200 tentang Kawasan

		peraturan-peraturan khusus				khusus	<p>Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)</p> <ul style="list-style-type: none"> - UU No. 5/1992 tentang Benda Cagar Budaya - Keputusan Mendikbud No. 062/1995 tentang Pemilikan, Penguasaan, Pengalihan, dan Penghapusan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs - Keputusan Mendikbud No. 063/1996 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya
		5.1.3 Dapat menjabarkan tujuan pengadaan peraturan-peraturan khusus				Berikan contoh tujuan pengadaan peraturan khusus pada zona kawasan cagar budaya	Tujuan pengadaan peraturan khusus setidaknya didasarkan pada rujukan yang tepat.
		5.1.4 Mampu menyusun daftar inventaris zona-zona yang tujuan pengaturan zonasi-nya belum terpenuhi melalui metode zonasi konvensional				Inventarisasikan zona-zona yang tujuan pengaturan zonasi-nya belum terpenuhi melalui metode zonasi konvensional	Zona-zona yang tujuan pengaturan zonasi-nya belum terpenuhi setidaknya dipertimbangkan dengan merujuk pada rujukan tentang peraturan-peraturan khusus.
		5.1.5 Mampu menyusun daftar inventaris tujuan pengaturan zonasi yang belum tercapai pada zona-zona tersebut				Inventarisasikan tujuan pengaturan zonasi yang belum tercapai pada zona-zona tersebut	Tujuan pengaturan zonasi yang belum tercapai setidaknya merujuk pada rujukan tentang peraturan-peraturan khusus.
5.2	Karakteristik khusus dan tujuan pengaturan dirumuskan dengan tepat	5.2.1 Dapat menguraikan karakteristik khusus zona				Uraikan secara singkat karakteristik khusus zona kawasan cagar budaya.	Menjelaskan hal-hal seperti: <ul style="list-style-type: none"> - Kedekatannya dengan landasan pacu pesawat - Faktor sejarah kawasan - Resiko bencana yang signifikan di kawasan
		5.2.2 Dapat menguraikan tujuan pengaturan zona				Jelaskan secara singkat tujuan pengaturan zona kawasan cagar budaya	Menjelaskan hal-hal seperti: <ul style="list-style-type: none"> - Perlunya menjamin keselamatan penerbangan di sekitar kawasan - Perlunya melestarikan bukti-bukti sejarah - Perlunya meminimalisasi dampak bencana terhadap kawasan
		5.2.3 Mampu menyusun daftar inventaris aspek yang perlu/potensial/akan diatur dari suatu zona dengan karakteristik				Sebutkan dan jelaskan secara singkat aspek yang perlu/potensial/akan diatur dari suatu zona secara umum	Menjelaskan hal-hal seperti: <ul style="list-style-type: none"> - Jarak, bentuk, dan tinggi bangunan dalam KKOP - Pemilikan lahan, pemanfaatan

		husus				<p>bangunan, dan perlindungan bangunan pada kawasan cagar budaya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jarak, bentuk, dan spesifikasi bangunan di kawasan rawan bencana
5.3	Teknik peraturan zonasi dipilih berdasarkan karakteristik khusus dan tujuan pengaturan zona yang telah ditetapkan	5.3.1 Dapat menguraikan berbagai teknik peraturan zonasi			Uraikan secara singkat berbagai teknik peraturan zonasi yang umum digunakan	<p>Alternatif teknik pengaturan zonasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Bonus/incentive zoning</i> - <i>Performance zoning</i> - <i>Fiscal zoning</i> - <i>Special zoning</i> - <i>Exclusionary zoning</i> - <i>Negotiated development</i>, dll
		5.3.2 Dapat menjabarkan kriteria pemilihan teknik peraturan zonasi berdasarkan karakteristik khusus dan tujuan pengaturan			Jabarkan secara umum kriteria pemilihan teknik peraturan zonasi berdasarkan karakteristik khusus dan tujuan pengaturan yang umum dipertimbangkan	<p>Kriteria umum yang dijelaskan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian dengan aspek alam dan budaya masyarakat - Kemudahan/kesulitan penerapan di lapangan - Tidak tumpang tindih dengan peraturan lain
		5.3.3 Dapat menganalisis karakteristik serta kekurangan dan kelebihan teknik peraturan zonasi yang dapat digunakan			Jelaskan secara singkat analisis karakteristik serta kekurangan dan kelebihan teknik peraturan zonasi yang umum digunakan	<p>Bonus Zoning/Incentive Zoning: (+) dapat memberikan ruang publik, (-) membuat bangunan tidak harmonis dgn sekitarnya</p> <p>Performance Zoning: (+) Mengharmoniskan layanan, kinerja, dan dampak dari bangunan, (-) Tidak mengatur wujud fisik secara spesifik</p> <p>Fiscal Zoning: (+) Efektif membatasi penyimpangan dengan pendekatan pajak, (-) Rawan terjadi misorientasi pengaturan zonasi</p> <p>Special Zoning: (+) Menyesuaikan dengan kondisi spesifik kawasan, (-) Rawan membuat kawasan yang lebih luas tidak harmonis</p> <p>Exclusionary Zoning: (+) Mengatur kepadatan kawasan secara spesifik, (-) Diskriminatif terhadap kelompok</p>

							masyarakat tertentu Negotiated Development: (+) Memperhatikan berbagai kepentingan yang ada, (-) Rawan melenceng dari tujuan pengaturan
		5.3.4 Mampu menyusun rincian teknik peraturan zonasi yang akan diterapkan pada zona tertentu				Jabarkan secara singkat rincian teknik peraturan zonasi yang akan diterapkan pada zona kawasan cagar budaya.	Rincian teknik peraturan zonasi yang dijabarkan setidaknya merujuk pada rujukan tentang peraturan khusus serta memperhatikan kriteria umum pemilihan teknik peraturan zonasi yang telah dijabarkan.

MATERI UJI KOMPETENSI TEORI

JABATAN KERJA : Ahli Peraturan Zonasi
UNIT KOMPETENSI : Merumuskan Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Zonasi
KODE UNIT KOMPETENSI : F45.PZ01.002.04

Elemen Kompetensi: 1 Membuat peta zonasi dan blok							
No.	Kriteria Unjuk Kerja (KUK)	Indikator Unjuk Kerja (IUK)	Aspek Kompetensi			Daftar Pertanyaan	Kunci Jawaban
			K	S	A		
1.1	Batas zona ditentukan berdasarkan zona-zona dasar yang telah ditetapkan	1.1.1 Dapat menguraikan dasar penentuan batas zona				Uraikan secara singkat dasar penentuan batas zona	Beberapa pertimbangan: <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah, ukuran, skala, dan intensitas kegiatan - Jumlah dan kepadatan penduduk - Layanan infrastruktur, fasum, dan fasos - Ketersediaan sumber daya alam - Ketersediaan potensi batas zona
		1.1.2 Dapat menjabarkan rujukan yang digunakan dalam penentuan batas zona				Jabarkan secara singkat rujukan yang dapat digunakan dalam penentuan batas zona	<ul style="list-style-type: none"> - Kepmendagri No. 59/1988 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota - Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 640/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota - Pemerintah DKI Jakarta, Dinas Tata

						Kota Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Penentuan Koefisien Daerah Hijau (KDH)
		1.1.3 Mampu menyusun daftar inventaris zona dasar yang telah ditetapkan beserta ukurannya			Inventarisasikan zona dasar beserta ukurannya	Daftar inventaris zona dasar disusun berdasarkan rujukan yang tepat
1.2	Zona dinotifikasi sesuai kode zona dasar dan teknik peraturan zonasi yang telah ditetapkan	1.2.1 Dapat menguraikan teknik notifikasi zona yang umum digunakan			Uraikan secara singkat teknik notifikasi zona	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan kode fungsi zona: (R = Residensial/Perumahan, K = Komersial/Perdagangan, I = Industri, dll) - Menggunakan klasifikasi fungsi/bentuk/skala tiap fungsi sesuai teknik pengaturan zonasi yang dipilih, dll
		1.2.2 Mampu menotifikasi zona sesuai teknik notifikasi yang telah ditetapkan			Berikan contoh notifikasi zona dengan teknik notifikasi yang telah ditetapkan pada zona permukiman kepadatan rendah, perdagangan skala lingkungan, dan transportasi skala regional.	Teknik notifikasi zona yang digunakan haruslah efisien, jelas, dan mudah dipahami.
1.3	Batas blok ditentukan berdasarkan batasan fisik	1.3.2 Mampu memberi tanda pada perencanaan yang berpotensi menghasilkan batasan fisik di peta			Sebutkan dan tandai pada peta perencanaan yang berpotensi menghasilkan batasan fisik	Rencana jaringan jalan, rencana kabel listrik, rencana waduk/bendungan, dll
		1.3.3 Dapat menggunakan batasan fisik yang tepat sebagai batas zona			Berikan contoh penggunaan batasan fisik yang tepat sebagai batas zona permukiman kepadatan rendah dan perdagangan skala lingkungan.	Batas fisik yang digunakan setidaknya mengacu kepada bentukan fisik, bentukan non-alam, ataupun perencanaan bentukan non-alam yang ada.
1.4	Peta zonasi dan blok disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku	1.4.1 Dapat menguraikan ketentuan dan pedoman yang berlaku dalam penyusunan peta zonasi dan blok			Uraikan secara singkat ketentuan dan pedoman yang berlaku dalam penyusunan peta zonasi dan blok	<ul style="list-style-type: none"> - PP No. 47/1997 tentang RTRW Nasional - PP RI No. 16/2004 tentang Penatagunaan Tanah - Kepmendagri No. 59/1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Permendagri No. 2/1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota
		1.4.2 Dapat mendeskripsikan proses kerja penyusunan peta zonasi dan blok			Jelaskan secara singkat proses kerja penyusunan peta zonasi dan blok yang umum dilaksanakan	<p>Contoh proses kerja penyusunan peta zonasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan peta geografis tertentu

							<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian informasi zona-zona dasar - Pemecahan zona-zona dasar menjadi blok dan sub-blok - Pemberian keterangan blok dan sub-blok - Pemberian keterangan kegiatan
--	--	--	--	--	--	--	---

Elemen Kompetensi: 2 Merumuskan aturan pelaksanaan							
No.	Kriteria Unjuk Kerja (KUK)	Indikator Unjuk Kerja (IUK)	Aspek Kompetensi			Daftar Pertanyaan	Kunci Jawaban
			K	S	A		
2.1	Persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan peraturan zonasi diinventarisasi dengan teliti	2.1.1 Dapat mengidentifikasi jenis persoalan dalam penyelenggaraan peraturan zonasi				Sebutkan dan jelaskan secara singkat jenis persoalan dalam penyelenggaraan peraturan zonasi yang umum terjadi	Menjelaskan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Masalah penerjemahan/tafsir peraturan - Masalah transisi peraturan - Masalah tumpang tindih wewenang aparat, dll
		2.1.2 Dapat menguraikan aspek perizinan, pengawasan dan penertiban				Sebutkan dan jelaskan secara singkat aspek perizinan, pengawasan dan penertiban yang umum dilaksanakan	Aspek perizinan: <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur perizinan - Syarat-syarat perizinan - Wewenang lembaga/aparat perizinan Aspek pengawasan: <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur, jadwal, dan standar pengawasan - Wewenang lembaga/aparat pengawasan Aspek penertiban: <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur dan bentuk penertiban - Wewenang lembaga/aparat penertiban
		2.1.3 Mampu menyusun daftar kemungkinan yang terjadi ketika peraturan zonasi diterapkan				Inventarisasikan kemungkinan yang terjadi ketika peraturan zonasi diterapkan	<ul style="list-style-type: none"> - Kebingungan dan penolakan dari masyarakat - Desakan perubahan peraturan zonasi, dll
		2.1.4 Mampu menyusun daftar hambatan yang akan muncul pada saat penerapan peraturan zonasi				Inventarisasikan hambatan yang akan muncul pada saat penerapan peraturan zonasi	<ul style="list-style-type: none"> - Ketidaksesuaian antara kepentingan ekonomi/permintaan pasar dengan ketetapan di peta zonasi - Birokrasi perizinan pengembangan

						<p>lahan yang berbelit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penolakan masyarakat akan penertiban bangunan berdasarkan peraturan zonasi
2.2	Peraturan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan peraturan zonasi diidentifikasi dengan tepat	2.2.1 Dapat mengidentifikasi jenis, tugas, dan kewenangan lembaga terkait peraturan zonasi			Sebutkan dan jelaskan secara singkat jenis, tugas, dan kewenangan lembaga terkait peraturan zonasi	<p>1. Lembaga Pengambil Keputusan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - Badan Perencanaan Daerah - Dinas Tata Kota - Lembaga lain terkait (Dinas Bangunan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, dll) <p>2. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah</p> <p>3. Lembaga Pembuat Rekomendasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komisi Perencanaan - Komisi Transportasi - Komisi Arsitektur Kota - Komisi Amdal/Pengendalian Pencemaran Lingkungan
		2.2.2 Dapat menguraikan prosedur pelaksanaan peraturan zonasi			Uraikan secara singkat prosedur pelaksanaan peraturan zonasi	<p>1. Peraturan Zonasi diterapkan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan baru b. Peremajaan lingkungan c. Perbaikan lingkungan <p>2. Pada kawasan yang sudah terbangun terdapat beberapa alternatif pelaksanaan Peraturan Zonasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dikenakan secara langsung b. Dikenakan pada saat akan melakukan rehabilitasi atau pembangunan kembali c. Diberi jangka waktu untuk menyesuaikan dengan rencana
		2.2.3 Mampu mengumpulkan dasar hukum penyelenggaraan peraturan zonasi			Sebutkan dan uraikan secara singkat dasar hukum penyelenggaraan peraturan zonasi di DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang - UU No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang - UU No. 32 tahun 2004 tentang

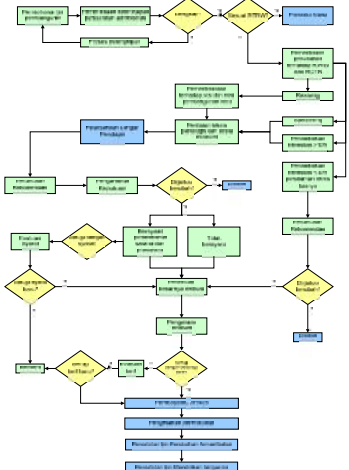
						<ul style="list-style-type: none"> Pemerintahan Daerah PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang PP No. 16/2004 tentang Penatagunaan Tanah PP No. 47/1997 tentang RTRW Nasional Kepmendagri No. 59/1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Permendagri No. 2/1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota
		2.2.4 Mampu menyusun aturan teknis yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan peraturan zonasi			Berikan contoh susunan aturan teknis yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan peraturan zonasi	<p>Contoh prosedur teknis penyelenggaraan peraturan zonasi:</p>
2.3	Aturan perizinan, pengawasan, dan penertiban disusun dengan cermat	2.3.1 Dapat mengidentifikasi peraturan dan kelembagaan yang dibutuhkan dalam perizinan, pengawasan, dan penertiban			Sebutkan dan uraikan secara singkat peraturan dan kelembagaan yang dibutuhkan dalam perizinan, pengawasan, dan penertiban di DKI Jakarta	<p>Peraturan:</p> <ul style="list-style-type: none"> UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang UU No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang PP No. 16/2004 tentang Penatagunaan Tanah PP No. 47/1997 tentang RTRW Nasional <p>Lembaga:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Tata Kota Lembagai lain terkait (Dinas Bangunan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Badan

						Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, dll)
	2.3.2 Mampu menyusun prosedur pemanfaatan ruang dan pembangunan				Berikan contoh prosedur pemanfaatan ruang dan pembangunan di DKI Jakarta	
	2.3.3 Dapat menyusun aturan variansi (penyesuaian) pemanfaatan ruang				Berikan contoh aturan variansi (penyesuaian) pemanfaatan ruang dan pembangunan di DKI Jakarta	<p>Contoh prosedur penyesuaian pemanfaatan ruang:</p>

Elemen Kompetensi: 3 Merumuskan aturan perubahan							
No.	Kriteria Unjuk Kerja (KUK)	Indikator Unjuk Kerja (IUK)	Aspek Kompetensi			Daftar Pertanyaan	Kunci Jawaban
			K	S	A		
3.1	Kemungkinan perubahan jenis peruntukan diidentifikasi berdasarkan antisipasi pertumbuhan ekonomi, perubahan kualitas lingkungan, keamanan atau kesehatan	3.1.1 Dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab perubahan peruntukan ruang				Sebutkan dan uraikan secara singkat beberapa faktor-faktor penyebab perubahan peruntukan ruang yang umum terjadi	<ul style="list-style-type: none"> - Dorongan ekonomi/pemintaan pasar - Perubahan keadaan sosial, budaya, gaya hidup, dll - Perkembangan teknologi
		3.1.2 Mampu menyusun daftar perkiraan bentuk-bentuk perubahan peruntukan ruang				Sebutkan dan uraikan secara singkat bentuk-bentuk perubahan peruntukan ruang yang disebabkan oleh faktor-faktor yang telah disebutkan	<p>Dorongan ekonomi: perumahan menjadi komersial/perkantoran, RTH menjadi komersial</p> <p>Perubahan gaya hidup: perumahan horizontal menjadi perumahan vertikal</p>

						Perkembangan teknologi: Perumahan menjadi perkantoran
	3.1.3 Dapat menetapkan prinsip, kriteria, dan syarat perubahan peruntukan ruang				Berikan contoh dan uraikan secara singkat beberapa prinsip, kriteria, dan syarat perubahan peruntukan ruang yang umum diberlakukan	<p>Syarat umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan untuk mengutamakan kepentingan publik yang lebih luas - Disebabkan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hirarkinya <p>Syarat khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mencerminkan dan mengantisipasi pertumbuhan ekonomi - Tidak mengurangi kualitas lingkungan - Tidak mengganggu ketertiban dan keamanan, dll
	3.1.4 Dapat menetapkan obyek dan prakarsa perubahan peruntukan ruang				Berikan contoh dan uraikan secara singkat beberapa obyek dan prakarsa perubahan peruntukan ruang	<p>Obyek perubahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peta zonasi (<i>zoning map</i>) - Peraturan zonasi (<i>zoning text/statemen</i>) - Peta zonasi dan peraturan zonasi <p>Prakarsa perubahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat perorangan maupun badan hukum - Pemerintah kota/kabupaten - DPRD Kota/Kabupaten
	3.1.5 Dapat menetapkan kategori, sifat, dan jenis perubahan peruntukan ruang				Berikan contoh dan uraikan secara singkat beberapa kategori, sifat, dan jenis perubahan peruntukan ruang	<p>Kategori perubahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan bersyarat 2. Perubahan diizinkan <p>Sifat perubahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan sementara 2. Perubahan besar <p>Jenis perubahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Spot zoning</i> - <i>Up-zoning</i> - <i>Down-zoning</i>

						- <i>Rezoning</i>	
3.2	Prosedur perubahan-perubahan pemanfaatan ruang (<i>re-zoning</i>) yang tidak mengganggu tujuan pengaturan dirumuskan dengan cermat	3.2.1 Dapat mengidentifikasi dampak perubahan pemanfaatan ruang				Uraikan secara singkat dampak perubahan pemanfaatan ruang di DKI Jakarta	Dampak yang diuraikan mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Dampak ekonomi - Dampak sosial - Dampak lingkungan dan kesehatan - Dampak keamanan dan ketertiban - Intensitas gangguan akibat dampak perubahan
		3.2.2 Dapat menetapkan biaya atas dampak dari perubahan pemanfaatan ruang				Hitung secara sederhana biaya atas dampak perubahan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan	Biaya yang dihitung setidaknya memperhitungkan tingkat dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan di suatu kawasan
		3.2.3 Mampu memperhitungkan biaya perubahan pemanfaatan ruang				Sebutkan serta berikan contoh beberapa dasar dan alternatif perhitungan biaya perubahan pemanfaatan ruang	Dasar pertimbangan perhitungan: <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pelanggaran/ketidaksesuaian suatu pemanfaatan baru terhadap RDTRK - Rujukan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. /1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan <p>Alternatif perhitungan: a. $R = l \times H \times L$ b. $R = p (\%) \times Bp$ c. $R = p (\%) \times (H - H_1) \times L$</p> dengan: R = Retribusi perubahan pemanfaatan lahan l = Indeks perubahan pemanfaatan lahan P = Prosentase perubahan pemanfaatan lahan H = Harga lahan setelah perubahan pemanfaatan lahan H ₁ = Harga lahan lama sebelum perubahan pemanfaatan lahan Bp = Biaya pembangunan pada lahan yang telah memperoleh perubahan, yaitu biaya pembangunan per m ² x luas lantai L = Luas lahan
		3.2.4 Dapat menyusun prosedur penetapan indikator perubahan				Berikan contoh prosedur penetapan indikator perubahan peruntukan ruang	Contoh prosedur penetapan indikator perubahan peruntukan ruang:

		<p>peruntukan ruang</p> <p>3.2.5 Dapat menyusun prosedur perubahan peruntukan ruang</p>			<p>Berikan contoh prosedur perubahan peruntukan ruang</p>	
<p>3.3</p>	<p>Peraturan pengenaan insentif/disinsentif dan aturan perubahan pemanfaatan ruang disusun dengan cermat.</p>	<p>3.3.1 Dapat menguraikan jenis-jenis instrumen insentif dan disinsentif</p>			<p>Sebutkan dan uraikan secara singkat beberapa jenis instrumen insentif dan disinsentif yang umum diterapkan</p>	<p>Insentif:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemudahan izin - Penghargaan - Keringanan pajak - Kompensasi - Imbalan, dll <p>Disinsentif:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perpanjang prosedur - Perketat/tambah syarat - Pajak tinggi - Retribusi tinggi - Denda, dll
		<p>3.3.2 Dapat merumuskan tujuan pengenaan insentif/disinsentif pada tiap jenis perubahan pemanfaatan ruang</p>			<p>Jelaskan secara singkat dampak yang dituju atas pengenaan insentif/disinsentif pada tiap jenis perubahan pemanfaatan ruang</p>	<p>Menyebutkan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha mencegah pergeseran tatanan ruang agar tidak merugikan pembangunan kota 2. Usaha agar setiap masyarakat sebagai warga negara memiliki hak dan martabat yang sama untuk memperoleh dan mempertahankan hidupnya 3. Usaha agar masyarakat turut berpartisipasi dalam proses

							pemanfaatan ruang untuk pembangunan
		3.3.3 Mampu menyusun daftar penggunaan instrumen insentif/disinsentif yang tepat pada tiap jenis perubahan pemanfaatan ruang				Sebutkan dan jelaskan secara singkat instrumen insentif/disinsentif yang tepat pada perubahan pemanfaatan ruang permukiman kepadatan rendah dan perdagangan skala lingkungan.	Instrumen insentif/disinsentif yang dipilih mempertimbangkan efektifitas dan efisiensinya dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

MATERI UJI KOMPETENSI TEORI

JABATAN KERJA : Ahli Peraturan Zonasi

UNIT KOMPETENSI : Melakukan Pendampingan Penyusunan Naskah Akademis dan Naskah Raperda

KODE UNIT KOMPETENSI : F45.PZ01.002.05

Elemen Kompetensi: 1 Melakukan persiapan pendampingan penyusunan naskah akademis							
No.	Kriteria Unjuk Kerja (KUK)	Indikator Unjuk Kerja (IUK)	Unsur Kompetensi			Daftar Pertanyaan	Kunci Jawaban
			K	S	A		
1.1	Persoalan penataan ruang di wilayah kabupaten/kota diidentifikasi dengan tepat	1.1.1 Dapat menguraikan permasalahan penataan ruang				Sebutkan dan uraikan secara singkat permasalahan penataan ruang yang umum terjadi di DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya Ruang Terbuka Hijau - Banyaknya pengalihan ruang residensial menjadi komersial baik secara legal maupun ilegal - Terjadinya gejala <i>sprawl</i> - Tidak meratanya kepadatan penduduk
		1.1.2 Dapat menjelaskan kebutuhan instrumen pengendalian untuk menerjemahkan perencanaan tata ruang				Jelaskan secara singkat instrumen pengendalian yang umum digunakan untuk menerjemahkan perencanaan tata ruang	Beberapa instrumen pengendalian penataan ruang: <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan zonasi - Perizinan - Insentif dan disinsentif - Pengenaan sanksi
		1.1.3 Dapat menjelaskan prosedur pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten/kota				Jelaskan secara singkat prosedur pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten/kota yang umum berlaku di Indonesia	Beberapa prosedur pengendalian pemanfaatan ruang: <ul style="list-style-type: none"> - Proses perizinan melalui berbagai instansi - Pengecekan berkala ke lapangan - Penerimaan pengaduan
		1.1.4 Mampu menyusun daftar kebutuhan pengendalian dalam penataan ruang kabupaten/kota				Sebutkan dan uraikan secara singkat kebutuhan pengendalian dalam penataan ruang di Kodya Jaksel	Menyebutkan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan menjaga daerah resapan air - Kebutuhan menjaga kawasan cagar budaya
1.2	Urgensi keberadaan	1.2.1 Dapat menguraikan				Uraikan secara singkat urgensi	<ul style="list-style-type: none"> - Amanat UU 27/2007 tentang Penataan

	dan penerapan ketentuan zonasi dalam penataan ruang di wilayah kabupaten/kota dianalisis dengan cermat	urgensi keberadaan peraturan zonasi			keberadaan peraturan zonasi di DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> Ruang Banyaknya penyimpangan pemanfaatan ruang dengan yang direncanakan Diperlukannya acuan pengendalian pemanfaatan ruang
		1.2.2 Dapat menyusun diagram posisi peraturan zonasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten/kota			Jelaskan secara singkat posisi peraturan zonasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang DKI Jakarta	<p>Skema hubungan Peraturan Zonasi dengan rencana tata ruang lain:</p> <pre> graph TD RTRW[RTRW Kota] --> RDTRK[RDTRK] RTRW --> PZ[Peraturan Zonasi] RDTRK --> RTRK[RTRK / RTBL] RDTRK --> PZ PZ -.-> RTRK </pre>
1.3	Kondisi masyarakat dan aparat pelaksana peraturan zonasi terhadap penataan ruang dianalisis berdasarkan persoalan penataan ruang	1.3.1 Mampu menyusun daftar jenis, tugas, dan kewenangan pihak terkait dengan penyusunan naskah akademis			Sebutkan dan jelaskan secara singkat jenis, tugas, dan kewenangan pihak terkait dengan penyusunan naskah akademis di DKI Jakarta	<p>Beberapa pihak terkait penyusunan naskah akademis:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bappeda dan pemerintah: Menyusun draft naskah akademis DPRD: Menyepakati naskah akademis
		1.3.2 Dapat menjelaskan peran serta masyarakat dalam penyusunan Raperda			Jelaskan secara singkat peran serta masyarakat dalam penyusunan Raperda yang umum berlaku di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Mengetahui secara terbuka proses serta produk dari penyusunan peraturan zonasi Memberikan pendapat, saran, masukan, dan penentuan tujuan serta arah pengendalian, pembatasan, dan kelonggaran dalam penetapan peta zonasi Memberikan kontribusi dalam perumusan aturan-aturan dalam pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang, dll
1.4	Keuntungan atas penerapan Perda diuraikan dengan cermat	1.4.1 Dapat memprediksi masalah pemanfaatan ruang serta keuntungan lain yang dapat diselesaikan dengan diterapkannya Perda			Sebutkan dan uraikan secara singkat masalah pemanfaatan ruang serta keuntungan lain yang dapat diselesaikan dengan diterapkannya Perda di DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> Alih fungsi kawasan perumahan menjadi kawasan perdagangan Alih fungsi kawasan resapan air dan konservasi lingkungan Ketidakmerataan distribusi kepadatan penduduk

		1.4.2 Mampu menyusun daftar prediksi masalah baru/efek samping yang dapat muncul dengan diterapkannya Perda			Sebutkan dan jelaskan secara singkat masalah baru/efek samping yang dapat muncul dengan diterapkannya Perda di DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Ketidakmampuan/ketidakfleksibelan penggunaan lahan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi - Munculnya segregasi sosial akibat zonasi yang kaku - Proses perizinan pemanfaatan lahan yang menjadi lebih panjang dan sulit
		1.4.3 Dapat menganalisis kecocokan/ketidakcocokan Perda dengan peraturan lain yang terkait/sejenis			Jelaskan secara singkat kecocokan/ketidakcocokan Perda dengan peraturan lain yang terkait/sejenis di DKI Jakarta	Hasil analisis harus menunjukkan pasal-pasal yang saling mendukung/tidak mendukung.
1.5	Tindakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul di masyarakat sehubungan dengan penataan ruang diidentifikasi dengan tepat	1.5.1 Mampu menyusun daftar permasalahan terkait penataan ruang kota/kabupaten			Sebutkan dan uraikan berbagai permasalahan terkait penataan ruang di DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya oknum yang mencari keuntungan pribadi dalam proses perizinan dan pengawasan penggunaan lahan - Budaya informal masyarakat yang tidak sesuai dengan semangat pengaturan ruang
		1.5.2 Dapat memperkirakan besar dan dampak permasalahan yang timbul			Jelaskan secara singkat besar dan dampak permasalahan tersebut	Besar dan dampak permasalahan dijelaskan dengan logis dan berdasarkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan.
		1.5.3 Dapat menguraikan tindakan yang perlu diambil dalam kerangka penataan ruang			Uraikan secara singkat tindakan yang perlu diambil dalam kerangka penataan ruang	<ul style="list-style-type: none"> - Masalah oknum: Pengawasan yang lebih ketat terhadap aparat perizinan dan pengawasan penggunaan lahan - Masalah budaya informal: Sosialisasi pada masyarakat akan pentingnya pengaturan fungsi lahan
1.6	Naskah akademis disusun berdasarkan sistematika yang dipersyaratkan dalam pedoman	1.6.1 Dapat menguraikan sistematika naskah akademis			Uraikan secara singkat sistematika naskah akademis yang umum digunakan	<p>Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan perundang-undangan yang berlaku - Peraturan sektoral yang berlaku - Klasifikasi zona - Aturan teknis zonasi - Standar teknis zonasi - Teknik peraturan zonasi - Peta zonasi dan blok - Aturan pelaksanaan - Aturan perubahan

Elemen Kompetensi: 2 Merumuskan Rancangan Perda							
No.	Kriteria Unjuk Kerja (KUK)	Indikator Unjuk Kerja (IUK)	Unsur Kompetensi			Daftar Pertanyaan	Kunci Jawaban
			K	S	A		
2.1	Tujuan pengaturan dan teknik pengaturan diidentifikasi berdasarkan naskah akademik	2.1.1 Dapat menyusun dasar pertimbangan serta tujuan penyusunan Perda				Berikan contoh dasar pertimbangan serta tujuan penyusunan Perda	<p>Menyebutkan dasar pertimbangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Naskah akademis Peraturan Zonasi - Aturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang berada pada hirarki di atasnya - Aturan yang mengatur tentang penyusunan Perda dan pembentukan aturan lainnya
		2.1.2 Dapat menjelaskan lingkup dan asas muatan materi Raperda				Jelaskan secara singkat lingkup dan asas muatan materi Raperda	<p>Lingkup Raperda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penataan wewenang (<i>regulation of authority</i>) bagi lembaga pelaksana (<i>law implementing agency</i>) - Penataan perilaku (<i>rule of conduct/rule of behavior</i>) bagi masyarakat yang harus mematuhi (<i>rule of occupant</i>) <p>Asas muatan materi Raperda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengayoman - Kemanusiaan - Kebangsaan - Kekeluargaan - Kenusantaraan - Bhinneka Tunggal Ika - Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan - Ketertiban dan Kepastian Hukum - Keseimbangan,

						keserasian, dan keselarasan
		2.1.3 Mampu mengembangkan teknik pengaturan tertentu yang akan ditetapkan dalam Perda			Jelaskan dan berikan contoh teknik pengaturan yang akan diterapkan dalam Perda DKI Jakarta	Menjelaskan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian teknik peraturan zonasi dengan konteks kawasan - Kelebihan teknik peraturan zonasi yang dipilih
2.2	Lembaga pelaksana (<i>law implementing agency</i>) dan lembaga pengawas pelaksanaan peraturan zonasi diidentifikasi dengan tepat	2.2.1 Mampu menyusun daftar jenis, tugas, dan kewenangan pihak terkait dengan penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan Rancangan Perda			Sebutkan dan jelaskan secara singkat jenis, tugas, dan kewenangan pihak terkait dengan penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan Rancangan Perda	Tahap penyusunan dan pengundangan: <ul style="list-style-type: none"> - DPRD (Komisi-komisi, pansus, sidang paripurna): mengusulkan, membahas, menyetujui dan mengundang Raperda - Unit kerja Pemda: Mengusulkan dan menyusun draft awal Raperda - Sekretaris Daerah: Menjembatani Pemda dengan DPRD - Walikota/Bupati: Menyetujui Raperda Tahap pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan: <ul style="list-style-type: none"> - Pemda: Melaksanakan Perda - DPRD: Mengawasi pelaksanaan Perda oleh Pemda
		2.2.2 Dapat menjelaskan prosedur pengawasan pelaksanaan Perda			Jelaskan secara singkat prosedur pengawasan pelaksanaan Perda yang umum digunakan	Beberapa prosedur pengawasan pelaksanaan Perda: <ul style="list-style-type: none"> - Forum bersama evaluasi pelaksanaan Perda - Penerimaan pengaduan
2.3	Pihak-pihak yang diatur (<i>rule occupant</i>) dan jenis pengaturan	2.3.1 Mampu menyusun daftar inventaris pihak-pihak yang akan			Sebutkan dan uraikan secara singkat pihak-pihak yang akan	Pihak-pihak yang akan diatur: <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah daerah

	untuk mengendalikan perilaku ditentukan berdasarkan asas pengayoman dan perlindungan	diatur dalam Perda				diatur dalam Perda	(pelaksana pembangunan, pemberi izin pembangunan, pengawas pembangunan) <ul style="list-style-type: none"> - Pelaku usaha swasta, BUMN, badan hukum lain, individu, dll (pelaksana pembangunan, pengawas pembangunan) - Masyarakat umum (pihak yang terkena dampak pembangunan) - Peradilan (penegak peraturan mengenai pembangunan)
		2.3.2 Mampu menyusun daftar inventaris perilaku pihak-pihak tersebut tanpa adanya Perda				Sebutkan dan jelaskan secara singkat perilaku pihak-pihak tersebut yang akan dikendalikan melalui Perda	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian izin pembangunan sesuai rencana tata ruang - Pembangunan sesuai rencana tata ruang - Pengawasan pembangunan agar sesuai rencana tata ruang - Kegiatan di lapangan sesuai rencana tata ruang
		2.3.3 Dapat menentukan metode pengendalian perilaku pihak-pihak tersebut				Sebutkan dan jelaskan secara singkat metode pengendalian perilaku pihak-pihak tersebut	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan metode dan ketentuan pemberian izin yang jelas - Sosialisasi rencana tata ruang - Pengawasan dan pengecekan berkala bangunan dan kegiatan di lapangan
2.4	Sanksi penyalahgunaan wewenang oleh aparat pelaksana dan sanksi yang memaksakan kepatuhan ditentukan secara proporsional terhadap tujuan pengaturan	2.4.1 Mampu menyusun daftar inventaris jenis dan bentuk penyalahgunaan wewenang oleh aparat pelaksana				Sebutkan dan uraikan secara singkat beberapa jenis dan bentuk penyalahgunaan wewenang oleh aparat pelaksana yang umum terjadi	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan izin pemanfaatan lahan yang tidak seharusnya diterbitkan - Pemberian izin perubahan pemanfaatan lahan yang

						<ul style="list-style-type: none"> - tidak seharusnya diberikan - Pencatatan data bangunan dan kegiatan yang tidak sesuai kenyataan pada pengawasan di lapangan
		2.4.2 Dapat memprediksi kerugian yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan wewenang			Sebutkan dan uraikan secara singkat kerugian yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan wewenang tersebut	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan lahan yang tidak seharusnya - Fakta lapangan dan data tercatat yang berbeda signifikan
		2.4.3 Dapat menyusun rangkaian tindakan yang membuat aparat pelaksana melaksanakan Perda dengan baik dan benar			Berikan contoh rangkaian tindakan yang dapat membuat aparat pelaksana melaksanakan Perda dengan baik dan benar	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan standar prosedur operasi (<i>standard operation procedure</i>) yang detail dan jelas - Pembuatan mekanisme sanksi yang jelas
2.5	Naskah Raperda dirumuskan berdasarkan anatomi Perda yang berlaku	2.5.1 Dapat menguraikan anatomi Perda berdasarkan ketentuan yang berlaku			Uraikan secara singkat anatomi Perda berdasarkan ketentuan yang berlaku	<p>Anatomi Perda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Judul - Pembukaan - Konsiderans - Dasar hukum - Diktum - Batang tubuh - Penutup - Penjelasan - Lampiran
		2.5.2 Mampu menyusun Raperda dengan bahasa yang tepat			Berikan contoh kalimat Raperda dengan bahasa yang tepat	<p>Kalimat yang diberikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan Bahasa Indonesia dan tunduk kepada kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar - Berciri jernih, lugas, baku dan serasi, serta taat asas - Menghindari pilihan kata yang sulit dimengerti dan berpotensi multitafsir
		2.5.3 Mampu menggunakan rujukan yang tepat dalam penyusunan Raperda			Sebutkan beberapa rujukan yang tepat dalam penyusunan Raperda	<p>Beberapa rujukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

								2. UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 3. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 4. Keppres RI No. 188/1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang
--	--	--	--	--	--	--	--	---

Elemen Kompetensi: 3 Membuat usulan penyempurnaan Raperda								
No.	Kriteria Unjuk Kerja (KUK)	Indikator Unjuk Kerja (IUK)	Unsur Kompetensi			Daftar Pertanyaan	Kunci Jawaban	
			K	S	A			
3.1	Masukan-masukan dalam forum pembahasan Raperda dirangkum dengan cermat	3.1.1 Mampu menyusun daftar inventaris butir-butir masukan dalam notulen pembahasan Raperda				Inventarisasikan butir-butir masukan umum yang patut diperhatikan	Butir-butir umum disebutkan dengan jelas dan ringkas	
		3.1.2 Dapat mengidentifikasi butir-butir masukan yang terkait dengan tujuan-tujuan pengaturan				Berikan contoh butir-butir masukan yang terkait dengan tujuan-tujuan pengaturan	Butir-butir umum yang terkait dengan tujuan pengaturan disebutkan dengan jelas dan ringkas	
		3.1.3 Harus mampu merangkum masukan-masukan dengan cermat dan teliti				Rangkumlah masukan-masukan dengan cermat dan teliti	<i>Praktekkan</i>	
3.2	Masukan-masukandianalisis berdasarkan tujuan pengaturan	3.2.1 Mampu menjabarkan butir-butir masukan masyarakat				Uraikan secara singkat butir-butir masukan masyarakat yang terkait dengan tujuan pengaturan	Butir-butir umum yang terkait dengan tujuan pengaturan dijabarkan dengan jelas dan ringkas	
		3.2.2 Dapat menguji keterkaitan masukan-masukan masyarakat terhadap tujuan pengaturan				Berikan contoh analisis keterkaitan masukan-masukan masyarakat terhadap tujuan pengaturan	Analisis keterkaitan masukan masyarakat terhadap tujuan pengaturan dijabarkan dengan jelas dan ringkas	
3.3	Usulan penyempurnaan Raperda disusun berdasarkan hasil analisis	3.3.1 Dapat memilih masukan yang tidak bertentangan dengan tujuan pengaturan				Sebutkan dan uraikan secara singkat beberapa masukan umum yang kemungkinan bertentangan dengan tujuan pengaturan	Masukan yang kemungkinan bertentangan dengan tujuan pengaturan dipisahkan dengan teliti	

		3.3.2 Mampu menyusun daftar inventaris masukan terhadap Raperda dari hasil forum pembahasan Raperda				Inventarisasikan masukan terhadap Raperda dari hasil forum pembahasan Raperda	Masukan terhadap Raperda dirumuskan dan diposisikan dengan tepat dan proporsional
--	--	---	--	--	--	---	---

MATERI UJI KOMPETENSI TEORI

JABATAN KERJA : Ahli Peraturan Zonasi

UNIT KOMPETENSI : Membuat Laporan

KODE UNIT KOMPETENSI : F45.PZ01.002.06

Elemen Kompetensi: 1 Melaporkan kegiatan persiapan referensi yang relevan							
No.	Kriteria Unjuk Kerja (KUK)	Indikator Unjuk Kerja (IUK)	Aspek Kompetensi			Daftar Pertanyaan	Kunci Jawaban
			K	S	A		
1.1	Langkah-langkah kerja dalam proses pengumpulan referensi diidentifikasi dengan tepat	1.1.1 Mampu menyusun daftar inventaris langkah-langkah kerja dalam proses persiapan referensi				Uraikan langkah-langkah kerja yang umum dilakukan dalam proses persiapan referensi	Menguraikan setidaknya: <ul style="list-style-type: none"> - Persiapan dokumen rujukan pada tingkat kabupaten/kota - Persiapan peta kerja untuk kabupaten/kota - Penyusunan zona-zona dasar berdasarkan rujukan yang berlaku - Persiapan daftar kegiatan pada zona yang akan diatur
		1.1.2 Dapat meninjau ulang dan merunutkan kembaliseluruh kegiatan yang telah dilakukan dalam proses persiapan referensi				Buatlah ringkasan seluruh kegiatan yang umum dilakukan dalam proses persiapan referensi	Ringkasan berisi langkah-langkah kerja yang disebutkan diatas dan kegiatan-kegiatan lain yang terkait
1.2	Hambatan yang dihadapi dijabarkan dengan tepat	1.2.1 Mampu menyusun daftar inventaris hambatan dalam proses persiapan referensi				Uraikan beberapa hambatan yang umum dihadapi dalam proses persiapan referensi	Menguraikan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Sulitnya mencari dokumen rujukan - Perbedaan kualitas dokumen rujukan, dll
		1.2.2 Dapat meninjau kembali seluruh hambatan yang dihadapi dalam proses persiapan referensi				Buatlah ringkasan seluruh hambatan yang umum dihadapi dalam proses persiapan referensi	Ringkasan berisi hambatan yang disebutkan diatas dan hambatan-hambatan lain yang terkait
		1.2.3 Dapat mengelompokkan dan saling mengaitkan hambatan yang dihadapi				Buatlah diagram pengelompokkan dan keterkaitan antar hambatan	Diagram pengelompokkan dan keterkaitan mudah dipahami dan membentuk pola yang jelas

1.3	Tindakan yang diambil untuk mengatasi hambatan dideskripsikan dengan tepat	1.3.1 Mampu menyusun daftar inventaris tindakan yang diambil untuk mengatasi hambatan dalam proses persiapan referensi				Uraikan beberapa tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi hambatan yang umum dihadapi	Menguraikan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan tim khusus pengumpulan referensi - Pencarian dokumen rujukan dari sumber sekunder
		1.3.2 Dapat menganalisis efektivitas dan efisiensi dari tindakan tersebut				Berikan analisis efektivitas dan efisiensi dari tindakan tersebut	Analisis efektivitas dan efisiensi dinilai dari kemampuan tindakan tersebut untuk memenuhi tujuan proses pengumpulan referensi
		1.3.3 Dapat memberi saran tindakan sebagai solusi yang sebaiknya dilakukan di masa depan				Berikan beberapa saran tindakan yang dapat diambil sebagai solusi di masa depan	Saran dan tindakan diberikan dengan mempertimbangkan tujuan proses pengumpulan referensi
1.4	Laporan kegiatan persiapan referensi disusun dengan teliti	1.4.1 Dapat mengidentifikasi persyaratan pelaporan dalam proses pengumpulan referensi				Sebutkan persyaratan pelaporan yang umum digunakan	Beberapa persyaratan pelaporan: <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat ringkasan langkah kerja yang dilakukan disertai keterangan capaian (<i>deliverable</i>), pelaksana, waktu, tempat, dll - Terdapat ringkasan hambatan dan tindakan yang dihadapi - Terdapat produk yang dihasilkan - Terdapat saran untuk pelaksanaan di masa depan
		1.4.2 Dapat menguraikan anatomi laporan dalam proses pengumpulan referensi				Uraikan secara singkat anatomi laporan yang umum digunakan	Anatomi yang dapat digunakan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ringkasan langkah kerja <ol style="list-style-type: none"> a. Bentuk kegiatan b. Capaian c. Pelaksana d. Waktu dan tempat, dll 2. Hambatan <ol style="list-style-type: none"> a. Bentuk hambatan b. Solusi yang diambil c. Efisiensi dan efektivitas solusi yang diambil 3. Produk yang dihasilkan 4. Saran
		1.4.3 Mampu mengkompilasi langkah kerja, hambatan, serta solusi hambatan dalam proses persiapan referensi				Buatlah kompilasi langkah kerja, hambatan, serta solusi hambatan dalam proses persiapan referensi	Kompilasi disusun secara lengkap dan berdasarkan anatomi yang telah ditetapkan

		1.4.4 Dapat memberi saran umum terhadap proses persiapan referensi				Berikan beberapa saran umum terhadap proses persiapan referensi	Saran umum diberikan dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai, kegiatan yang telah dilaksanakan, dan hambatan yang telah dihadapi.
--	--	--	--	--	--	---	---

Elemen Kompetensi: 2 Melaporkan kegiatan analisis informasi yang relevan							
No.	Kriteria Unjuk Kerja (KUK)	Indikator Unjuk Kerja (IUK)	Aspek Kompetensi			Daftar Pertanyaan	Kunci Jawaban
			K	S	A		
2.1	Langkah-langkah kerja dalam proses analisis informasi diidentifikasi dengan tepat	2.1.1 Mampu menyusun daftar inventaris langkah-langkah kerja dalam proses analisis informasi				Sebutkan langkah-langkah kerja yang umum dilakukan dalam proses analisis informasi	Menguraikan setidaknya: <ul style="list-style-type: none"> - Analisis jenis, tingkat, dan konsekuensi dampak kegiatan - Kajian kesesuaian daya dukung lahan dengan pengembangan kegiatan - Kajian kegiatan dalam zona - Perumusan penangan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai (<i>incompatible</i> atau <i>nonconforming</i>) dengan karakteristik zona
		2.1.2 Dapat meninjau ulang dan meruntukan kembali seluruh kegiatan yang telah dilakukan dalam proses analisis informasi				Buatlah ringkasan seluruh kegiatan yang umum dilakukan dalam proses analisis informasi	Ringkasan berisi langkah-langkah kerja yang disebutkan diatas dan kegiatan-kegiatan lain yang terkait
2.2	Hambatan yang dihadapi dijabarkan dengan tepat	2.2.1 Mampu menyusun daftar inventaris hambatan dalam proses analisis informasi				Sebutkan beberapa hambatan yang umum dihadapi dalam proses analisis informasi	Menguraikan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Tidak lengkapnya rujukan dalam analisis dampak kegiatan - Terlalu beragamnya dampak kegiatan - Terlalu beragamnya tingkat ketidaksesuaian kegiatan dengan karakteristik zona
		2.2.2 Dapat meninjau kembali seluruh hambatan yang dihadapi dalam proses analisis informasi				Buatlah ringkasan seluruh hambatan yang umum dihadapi dalam proses analisis informasi	Ringkasan berisi hambatan yang disebutkan diatas dan hambatan-hambatan lain yang terkait
		2.2.3 Dapat mengelompokkan dan saling mengaitkan hambatan yang				Buatlah diagram pengelompokkan dan	Diagram pengelompokkan dan keterkaitan mudah dipahami dan

		dihadapi				keterkaitan antar hambatan	membentuk pola yang jelas
2.3	Tindakan yang diambil untuk mengatasi hambatan dideskripsikan dengan tepat	2.3.1 Mampu menyusun daftar inventaris tindakan yang diambil untuk mengatasi hambatan dalam proses analisis informasi				Sebutkan beberapa tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi hambatan yang umum dihadapi	Menguraikan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan tim khusus analisis informasi - Penggunaan rujukan dair contoh peraturan zonasi lain - Pengabaian tingkat keberagaman kegiatan
		2.3.2 Dapat menganalisis efektivitas dan efisiensi dari tindakan tersebut				Berikan analisis efektivitas dan efisiensi dari tindakan tersebut	Analisis efektivitas dan efisiensi dinilai dari kemampuan tindakan tersebut untuk memenuhi tujuan proses pengumpulan referensi
		2.3.3 Dapat memberi saran tindakan sebagai solusi yang sebaiknya dilakukan di masa depan				Berikan beberapa saran tindakan yang dapat diambil sebagai solusi di masa depan	Saran dan tindakan diberikan dengan mempertimbangkan tujuan proses pengumpulan referensi
2.4	Laporan kegiatan analisis informasi disusun dengan teliti	2.4.1 Dapat mengidentifikasi persyaratan pelaporan dalam proses analisis informasi				Sebutkan persyaratan pelaporan yang umum digunakan	Beberapa persyaratan pelaporan: <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat ringkasan langkah kerja yang dilakukan disertai keterangan capaian (<i>deliverable</i>), pelaksana, waktu, tempat, dll - Terdapat ringkasan hambatan dan tindakan yang dihadapi - Terdapat produk yang dihasilkan - Terdapat saran untuk pelaksanaan di masa depan
		2.4.2 Dapat menguraikan anatomi laporan dalam proses analisis informasi				Uraikan secara singkat anatomi laporan yang umum digunakan	Anatomi yang dapat digunakan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ringkasan langkah kerja <ol style="list-style-type: none"> a. Bentuk kegiatan b. Capaian c. Pelaksana d. Waktu dan tempat, dll 2. Hambatan <ol style="list-style-type: none"> a. Bentuk hambatan b. Solusi yang diambil c. Efisiensi dan efektivitas solusi yang diambil 3. Produk yang dihasilkan 4. Saran
		2.4.3 Mampumengkompilasi langkah kerja, hambatan, serta solusi				Buatlah kompilasi langkah kerja, hambatan, serta solusi	Kompilasi disusun secara lengkap dan berdasarkan anatomi yang telah

		hambatan dalam proses analisis informasi				hambatan dalam proses analisis informasi	ditetapkan
		2.4.4 Mampu memberi saran umum terhadap proses analisis informasi				Berikan beberapa saran umum terhadap proses analisis informasi	Saran umum diberikan dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai, kegiatan yang telah dilaksanakan, dan hambatan yang telah dihadapi.

Elemen Kompetensi: 3 Melaporkan kegiatan perumusan dokumen teknis peraturan zonasi							
No.	Kriteria Unjuk Kerja (KUK)	Indikator Unjuk Kerja (IUK)	Aspek Kompetensi			Daftar Pertanyaan	Kunci Jawaban
			K	S	A		
3.1	Langkah-langkah kerja dalam proses perumusan dokumen teknis diidentifikasi dengan tepat	3.1.1 Mampu menyusun daftar inventaris langkah-langkah kerja dalam proses perumusan dokumen teknis				Sebutkan langkah-langkah kerja yang umum dilakukan dalam proses perumusan dokumen teknis	Menguraikan setidaknya: <ul style="list-style-type: none"> - Perumusan klasifikasi zona - Pembuatan delinieasi zona - Perumusan aturan teknis zonasi - Perumusan standar teknis - Penentuan teknik peraturan zonasi berdasarkan tujuan pengaturan
		3.1.2 Dapat meninjau ulang dan merunutkan kembali kembaliseluruh kegiatan yang telah dilakukan dalam proses perumusan dokumen teknis				Buatlah ringkasan seluruh kegiatan yang umum dilakukan dalam proses perumusan dokumen teknis	Ringkasan berisi langkah-langkah kerja yang disebutkan diatas dan kegiatan-kegiatan lain yang terkait
3.2	Hambatan yang dihadapi dijabarkan dengan tepat	3.2.1 Mampu menyusun daftar inventaris hambatan dalam proses perumusan dokumen teknis				Sebutkan beberapa hambatan yang umum dihadapi dalam proses perumusan dokumen teknis	Menguraikan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Terlalu beragamnya bentuk zona - Tidak lengkapnya rujukan untuk delineasi zona, dll
		3.2.2 Dapat meninjau kembali seluruh hambatan yang dihadapi dalam proses perumusan dokumen teknis				Buatlah ringkasan seluruh hambatan yang umum dihadapi dalam proses perumusan dokumen teknis	Ringkasan berisi hambatan yang disebutkan diatas dan hambatan-hambatan lain yang terkait
		3.2.3 Dapat mengelompokkan dan saling mengaitkan hambatan yang dihadapi				Buatlah diagram pengelompokkan dan keterkaitan antar hambatan	Diagram pengelompokkan dan keterkaitan mudah dipahami dan membentuk pola yang jelas
3.3	Tindakan yang diambil untuk mengatasi hambatan dideskripsikan dengan tepat	3.3.1 Mampu menyusun daftar inventaris tindakan yang diambil untuk mengatasi hambatan dalam proses perumusan dokumen teknis				Sebutkan beberapa tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi hambatan yang umum dihadapi	Menguraikan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan tim khusus perumusan dokumen teknis - Penggunaan peraturan zonasi lain

						sebagai contoh	
		3.3.2 Dapat menganalisis efektivitas dan efisiensi dari tindakan tersebut				Berikan analisis efektivitas dan efisiensi dari tindakan tersebut	Analisis efektivitas dan efisiensi dinilai dari kemampuan tindakan tersebut untuk memenuhi tujuan proses pengumpulan referensi
		3.3.3 Dapat memberi saran tindakan sebagai solusi yang sebaiknya dilakukan di masa depan				Berikan beberapa saran tindakan yang dapat diambil sebagai solusi di masa depan	Saran dan tindakan diberikan dengan mempertimbangkan tujuan proses pengumpulan referensi
3.4	Laporan kegiatan perumusan dokumen teknis disusun dengan teliti	3.4.1 Dapat mengidentifikasi persyaratan pelaporan dalam proses perumusan dokumen teknis				Sebutkan persyaratan pelaporan yang umum digunakan	Beberapa persyaratan pelaporan: <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat ringkasan langkah kerja yang dilakukan disertai keterangan capaian (<i>deliverable</i>), pelaksana, waktu, tempat, dll - Terdapat ringkasan hambatan dan tindakan yang dihadapi - Terdapat produk yang dihasilkan - Terdapat saran untuk pelaksanaan di masa depan
		3.4.2 Dapat menguraikan anatomi laporan dalam proses perumusan dokumen teknis				Uraikan secara singkat anatomi laporan yang umum digunakan	Anatomi yang dapat digunakan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ringkasan langkah kerja <ol style="list-style-type: none"> a. Bentuk kegiatan b. Capaian c. Pelaksana d. Waktu dan tempat, dll 2. Hambatan <ol style="list-style-type: none"> a. Bentuk hambatan b. Solusi yang diambil c. Efisiensi dan efektivitas solusi yang diambil 3. Produk yang dihasilkan 4. Saran
		3.4.3 Mampumengkompilasi langkah kerja, hambatan, serta solusi hambatan dalam proses perumusan dokumen teknis				Buatlah kompilasi langkah kerja, hambatan, serta solusi hambatan dalam proses perumusan dokumen teknis	Kompilasi disusun secara lengkap dan berdasarkan anatomi yang telah ditetapkan
		3.4.4 Mampu memberi saran umum terhadap proses perumusan dokumen teknis				Berikan beberapa saran umum terhadap proses perumusan dokumen teknis	Saran umum diberikan dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai, kegiatan yang telah dilaksanakan, dan hambatan yang telah dihadapi.

Elemen Kompetensi: 4 Melaporkan kegiatan perumusan ketentuan pelaksanaan peraturan zonasi							
No.	Kriteria Unjuk Kerja (KUK)	Indikator Unjuk Kerja (IUK)	Aspek Kompetensi			Daftar Pertanyaan	Kunci Jawaban
			K	S	A		
4.1	Langkah-langkah kerja dalam proses perumusan ketentuan pelaksanaan diidentifikasi dengan tepat	4.1.1 Mampu menyusun daftar inventaris langkah-langkah kerja dalam proses perumusan ketentuan pelaksanaan				Sebutkan langkah-langkah kerja yang umum dilakukan dalam proses perumusan ketentuan pelaksanaan peraturan zonasi	Menguraikan setidaknya: <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan peta zonasi dan blok - Perumusan aturan pelaksanaan - Perumusan aturan perubahan
		4.1.2 Dapat meninjau ulang dan merunutkan kembaliseluruh kegiatan yang telah dilakukan dalam proses perumusan ketentuan pelaksanaan				Buatlah ringkasan seluruh kegiatan yang umum dilakukan dalam proses perumusan ketentuan pelaksanaan peraturan zonasi	Ringkasan berisi langkah-langkah kerja yang disebutkan diatas dan kegiatan-kegiatan lain yang terkait
4.2	Hambatan yang dihadapi dijabarkan dengan tepat	4.2.1 Mampu menyusun daftar inventaris hambatan dalam proses perumusan ketentuan pelaksanaan				Sebutkan beberapa hambatan yang umum dihadapi dalam proses perumusan ketentuan pelaksanaan peraturan zonasi	Menguraikan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Sulitnya menemukan batas fisik zona - Terlalu beragamnya faktor penyebab perubahan ruang
		4.2.2 Dapat meninjau kembali seluruh hambatan yang dihadapi dalam proses perumusan ketentuan pelaksanaan				Buatlah ringkasan seluruh hambatan yang umum dihadapi dalam proses perumusan ketentuan pelaksanaan peraturan zonasi	Ringkasan berisi hambatan yang disebutkan diatas dan hambatan-hambatan lain yang terkait
		4.2.3 Dapat mengelompokkan dan saling mengaitkan hambatan yang dihadapi				Buatlah diagram pengelompokkan dan keterkaitan antar hambatan	Diagram pengelompokkan dan keterkaitan mudah dipahami dan membentuk pola yang jelas
4.3	Tindakan yang diambil untuk mengatasi hambatan dideskripsikan dengan tepat	4.3.1 Mampu menyusun daftar inventaris tindakan yang diambil untuk mengatasi hambatan dalam proses perumusan ketentuan pelaksanaan				Sebutkan beberapa tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi hambatan yang umum dihadapi	Menguraikan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Pencarian/pembuatan batas fisik yang inkonvensional - Pengabaian keberagaman faktor penyebab perubahan ruang
		4.3.2 Dapat menganalisis efektivitas dan efisiensi dari tindakan tersebut				Berikan analisis efektivitas dan efisiensi dari tindakan tersebut	Analisis efektivitas dan efisiensi dinilai dari kemampuan tindakan tersebut untuk memenuhi tujuan proses pengumpulan referensi
		4.3.3 Dapat memberi saran tindakan sebagai solusi yang sebaiknya				Berikan beberapa saran tindakan yang dapat diambil	Saran dan tindakan diberikan dengan mempertimbangkan tujuan proses

		dilakukan di masa depan				sebagai solusi di masa depan	pengumpulan referensi
4.4	Laporan kegiatan perumusan ketentuan pelaksanaan disusun dengan teliti	4.4.1 Dapat mengidentifikasi persyaratan pelaporan dalam proses perumusan ketentuan pelaksanaan				Sebutkan persyaratan pelaporan yang umum digunakan	Beberapa persyaratan pelaporan: <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat ringkasan langkah kerja yang dilakukan disertai keterangan capaian (<i>deliverable</i>), pelaksana, waktu, tempat, dll - Terdapat ringkasan hambatan dan tindakan yang dihadapi - Terdapat produk yang dihasilkan - Terdapat saran untuk pelaksanaan di masa depan
		4.4.2 Dapat menguraikan anatomi laporan dalam proses perumusan ketentuan pelaksanaan				Uraikan secara singkat anatomi laporan yang umum digunakan	Anatomi yang dapat digunakan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ringkasan langkah kerja <ol style="list-style-type: none"> a. Bentuk kegiatan b. Capaian c. Pelaksana d. Waktu dan tempat, dll 2. Hambatan <ol style="list-style-type: none"> a. Bentuk hambatan b. Solusi yang diambil c. Efisiensi dan efektivitas solusi yang diambil 3. Produk yang dihasilkan 4. Saran
		4.4.3 Mampumengkompilasi langkah kerja, hambatan, serta solusi hambatan dalam proses perumusan ketentuan pelaksanaan				Buatlah kompilasi langkah kerja, hambatan, serta solusi hambatan dalam proses perumusan ketentuan pelaksanaan peraturan zonasi	Kompilasi disusun secara lengkap dan berdasarkan anatomi yang telah ditetapkan
		4.4.4 Mampu memberi saran umum terhadap proses perumusan ketentuan pelaksanaan				Berikan beberapa saran umum terhadap proses perumusan ketentuan pelaksanaan peraturan zonasi	Saran umum diberikan dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai, kegiatan yang telah dilaksanakan, dan hambatan yang telah dihadapi.

Elemen Kompetensi: 5 Melaporkan kegiatan pendampingan penyusunan naskah Raperda

No.	Kriteria Unjuk Kerja (KUK)	Indikator Unjuk Kerja (IUK)	Aspek Kompetensi			Daftar Pertanyaan	Kunci Jawaban
			K	S	A		

5.1	Langkah-langkah kerja dalam pendampingan penyusunan naskah raperda diidentifikasi dengan tepat	5.1.1 Mampu menyusun daftar inventaris langkah-langkah kerja dalam proses penyusunan naskah Raperda				Sebutkan langkah-langkah kerja yang umum dilakukan dalam proses penyusunan naskah Raperda	Menguraikan setidaknya: <ul style="list-style-type: none"> - Persiapan pendampingan penyusunan naskah akademis - Perumusan Rancangan Perda - Pembuatan usulan penyempurnaan Raperda
		5.1.2 Dapat meninjau ulang dan merunutkan kembaliseluruh kegiatan yang telah dilakukan dalam proses pendampingan penyusunan Raperda				Buatlah ringkasan seluruh kegiatan yang umum dilakukan dalam proses penyusunan naskah Raperda	Ringkasan berisi langkah-langkah kerja yang disebutkan diatas dan kegiatan-kegiatan lain yang terkait
5.2	Hambatan yang dihadapi dijabarkan dengan tepat	5.2.1 Mampu menyusun daftar inventaris hambatan dalam penyusunan naskah Raperda				Sebutkan beberapa hambatan yang umum dihadapi dalam proses penyusunan naskah Raperda	Menguraikan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Rumitnya birokrasi penyusunan Raperda - Kesulitan penerjemahan naskah akademis menjadi kalimat-kalimat Raperda
		5.2.2 Dapat meninjau kembali seluruh hambatan yang dihadapi dalam proses pendampingan penyusunan Raperda				Buatlah ringkasan seluruh hambatan yang umum dihadapi dalam proses penyusunan naskah Raperda	Ringkasan berisi hambatan yang disebutkan diatas dan hambatan-hambatan lain yang terkait
		5.2.3 Dapat mengelompokkan dan saling mengaitkan hambatan yang dihadapi				Buatlah diagram pengelompokkan dan keterkaitan antar hambatan	Diagram pengelompokkan dan keterkaitan mudah dipahami dan membentuk pola yang jelas
5.3	Tindakan yang diambil untuk mengatasi hambatan dideskripsikan dengan tepat	5.3.1 Mampu menyusun daftar inventaris tindakan yang diambil untuk mengatasi hambatan dalam proses pendampingan penyusunan Raperda				Uraikan secara singkat tindakan yang dapat diambil untuk menghadapi hambatan	Menguraikan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Proses belajar birokrasi penyusunan Raperda - Proses belajar bahasa perundang-undangan
		5.3.2 Dapat menganalisis efektivitas dan efisiensi dari tindakan tersebut				Berikan analisis efektivitas dan efisiensi dari tindakan tersebut	Analisis efektivitas dan efisiensi dinilai dari kemampuan tindakan tersebut untuk memenuhi tujuan proses pengumpulan referensi
		5.3.3 Dapat memberi saran tindakan sebagai solusi yang sebaiknya dilakukan di masa depan				Berikan beberapa saran tindakan yang dapat diambil sebagai solusi di masa depan	Saran dan tindakan diberikan dengan mempertimbangkan tujuan proses pengumpulan referensi
5.4	Laporan kegiatan pendampingan penyusunan naskah raperda disusun dengan teliti	5.4.1 Dapat mengidentifikasi persyaratan pelaporan dalam proses penyusunan naskah raperda				Sebutkan persyaratan pelaporan yang umum digunakan	Beberapa persyaratan pelaporan: <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat ringkasan langkah kerja yang dilakukan disertai keterangan capaian (<i>deliverable</i>), pelaksana, waktu, tempat, dll

						<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat ringkasan hambatan dan tindakan yang dihadapi - Terdapat produk yang dihasilkan - Terdapat saran untuk pelaksanaan di masa depan
		5.4.2 Dapat menguraikan anatomi laporan dalam proses penyusunan naskah raperda			Uraikan secara singkat anatomi laporan yang umum digunakan	<p>Anatomi yang dapat digunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ringkasan langkah kerja <ol style="list-style-type: none"> a. Bentuk kegiatan b. Capaian c. Pelaksana d. Waktu dan tempat, dll 2. Hambatan <ol style="list-style-type: none"> a. Bentuk hambatan b. Solusi yang diambil c. Efisiensi dan efektivitas solusi yang diambil 3. Produk yang dihasilkan 4. Saran
		5.4.3 Mampumengkompilasi langkah kerja, hambatan, serta solusi hambatan dalam proses pendampingan penyusunan raperda			Buatlah kompilasi langkah kerja, hambatan, serta solusi hambatan dalam proses penyusunan naskah Raperda	Kompilasi disusun secara lengkap dan berdasarkan anatomi yang telah ditetapkan
		5.4.4 Dapat memberi saran umum terhadap proses pendampingan penyusunan raperda			Berikan beberapa saran umum terhadap proses penyusunan naskah Raperda	Saran umum diberikan dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai, kegiatan yang telah dilaksanakan, dan hambatan yang telah dihadapi.